

**MEMBANGUN KESADARAN PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA
SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK**

(Studi kasus mahasiswa Jurusan IPS Prodi PPKn di FKIP Unkhair)

SKRIPSI



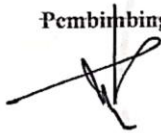
Oleh :

Salti Saiful
03071811035

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN JURUSAN ILMU PENDIDIKAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KHAIRUN
TERNATE
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING**MEMBANGUN KESADARAN PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA
SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK****Oleh****SALTI SAIFUL**
NPM. 03071811035

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Pada tanggal 27 Januari 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan

Pembimbing I**Dr. Mohtar Kamisi, S.Pd., M.Si**
NIP. 196704041991051001**Pembimbing II****Drs. Mukhtar Yusuf, M.Si**
NIP. 196601032002121001**Mengetahui****Ketua Program Studi**
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP Universitas Khairun**Dr. Wahyudin Noe, S.Pd., M.Pd**
NIP. 198405052019031018

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Salti Saiful

Judul Skripsi : Membangun Kesadaran Partisipasi Politik Mahasiswa Sebagai Upaya Implementasi Pendidikan Politik

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Khairun pada hari Senin tanggal 27 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor: 1004/UN44.C3/EP.10/2023 tanggal 27 Januari 2023

Panitia dan Dewan Penguji:

1. Dr. Mohtar Kamisi, S.Pd., M.Si
(Pembimbing Utama)

(.....)

2. Drs. Mukhtar Yusuf, M.Si
(Pembimbing Pendamping)

(.....)

3. Jainudin Abdullah, S.Pd., M.Pd
(Penguji Utama)

(.....)

4. Dr. Wahyudin Noe, S.Pd., M.Pd
(Anggota Penguji -1)

(.....)

5. Nani I Rajaloa, S.Pd., M.Pd
(Anggota Penguji -2)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Khairun,



PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Salti Saiful

Judul Skripsi : Membangun kesadaran Partisipasi Politik Mahasiswa Sebagai Upaya Implementasi Pendidikan Politik

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Khairun pada jumat 27 Januari 2023 berdasarkan Surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 1004/UN44.C3/EP.10/2023 tanggal 27 Januari 2023.

Panitia dan Dewan Penguji:

Jainudin Abdullah, S.Pd., M.Pd (.....)
(Penguj Utama)

Dr. Wahyudin Noe, S.Pd., M.Pd Drs. (.....)
(Anggota Penguji-1)

Nani I Rajaloe, S.Pd., M.Pd (.....)
(Anggota Penguji-2)

Dr. Mohtar Kamisi, S.Pd., M.Pd (.....)
(Pembimbing Utama)

Drs. Mukhtar Yusuf, M. Si (.....)
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Khairun,

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salti Saiful
Nomor Pokok Mahasiswa : 03071811035
Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Lembaga Asli : FKIP Universitas Khairun

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang di susun merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain dan telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Khairun.

Terdate, 20 Januari 2023

Yang membuat pernyataan ini



Salti Saiful

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Apa bila seseorang mengerjakan sesuatu dengan penuh penghayatan dan keyakinan maka setiap yang dikerjakan akan membuahkan hasil yang baik”

Salti Saiful

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Saiful M. Sangaji dan Ibunda Salbia Ahad, Terimah kasih telah memberikan dukungan serta doa terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Almamater tercinta Universitas Khairun Ternate tempat penulis menimba ilmu.

ABSTRAK

Salti Saiful. **Membangun kesadaran Partisipasi Politik Mahasiswa Sebagai Upaya Implementasi Pendidikan Politik.** Dibawah bimbingan Dr. Mohtar Kamisi, S.Pd., M.Si dan Drs. Mukhtar Yusuf, M.Si

Latar belakang partisipasi politik merupakan bagian penting penerapan konsep demonstrasi. Partisipasi politik mahasiswa dalam kegiatan kampus menjamin terpenuhinya hak sebagai mahasiswa dalam kampus partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk serta aktif dalam kehidupan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa PPKn tentang partisipasi politik. Mengetahui kesadaran partisipasi politik mahasiswa sebagai upaya implementasi pendidikan politik. Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa PPKn sebagai upaya implementasi pendidikan politik. Metode penelitian ini adalah mahasiswa program studi PPKn angkatan 2019, 2020, 2021, 2022. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi,.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pemahaman mahasiswa PPKn tentang partisipasi politik, selama ini mahasiswa telah melakukan aktivitas dan mengikuti kegiatan baik itu kegiatan keikutserta dalam pemilihan ketua HMJ maupun kampanye dan mahasiswa juga sering berdiskusi. Dan pemahaman mahasiswa tentang partisipasi politik dapat dilihat dari aktivitas dan kegiatan yang sering dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus. 2) Membangun kesadaran partisipasi politik mahasiswa sebagai bentuk implementasi pendidikan politik, mahasiswa perlu melakukan aktivitas, kesadaran partisipasi politik dikalangan mahasiswa merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran partisipasi politik mahasiswa, hal ini dapat diartikan bahwa membangun kesadaran partisipasi politik merupakan aktivitas yang terorganisir dan efektif yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipasi politik yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Lewat partisipasi politik membangun kesadaran partisipasi politik, orang yang berusaha melakukan pembentukan pribadi yang demokratis, disamping usaha demokratis ada struktur kemahasiswaannya. 3) Bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa PPKn sebagai pewujudan warga Negara yang baik, dapat dilihat secara langsung a). Pemilihan ketua umum HMJ b) Melakukan kampanye c) Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun d) Melakukan diskusi politik e) Aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik lainnya. Sebagai perwujudan warga negara yang baik, mahasiswa memiliki hak dan kewajiban dalam lingkungan kampus. 1). Hak mahasiswa 2) Kewajiban mahasiswa 3) larangan bagi mahasiswa 4) sanksi : Apabila mahasiswa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan dikenai sanksi akademik dan sanksi non akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Partisipasi politik, pendidikan politik

ABSTRACT

Salti Saiful *building awareness off student political participation as an effort to implement political education.* Under the guidance of. Dr Mohtar Kamisi, S.Pd., M.Si and Drs. Mukhtar Yusuf, M.si

The background of political participation is an important part of implementing the concept of demonstration. Political participation of students in campus activities guarantees the fulfillment of their rights as students on campus. Political participation is the activity of a person or group to be active in political life. This study aims to determine the understanding of PPKn students about political participation. Knowing the awareness of student political participation as an effort to implement political education. To find out the forms of political participation of PPKn students as an effort to implement political education. This research method is students of the PPKn study program batches of 2019, 2020, 2021, 2022. Observation data collection techniques, interviews and documentation.

Based on the results of this study it can be concluded that: 1. PPKn students' understanding of political participation, so far students have carried out activities and participated in activities, both participating in the election of HMJ chairmen and campaigns and students also often have discussions. And students' understanding of political participation can be seen from the activities and activities that are often carried out by students in the campus environment. 2. Building awareness of student political participation as a form of implementing political education, students need to carry out activities, awareness of political participation among students is very important in increasing awareness of student political participation, this can be interpreted that building awareness of political participation is an organized activity and which is carried out intentionally and systematically to form individuals to be able to become political participants who are ethically/morally responsible in achieving political goals. Through political participation to build awareness of political participation, people who try to make a democratic personal formation, in addition to democratic efforts there is a student structure. 3). Forms of political participation of PPKn students as the embodiment of good citizens, can be seen directly a). Election of the general chairman of HMJ b) Conducting campaigns c) Orderly, peaceful and polite demonstrations d) Conducting political discussions e) Actively participating in activities -Other political activities. As the embodiment of good citizens, students have rights and obligations in the campus environment. 1). Student rights 2) Student obligations 3) Prohibition for students 4) Sanctions: If students violate the provisions mentioned above, they will be subject to academic sanctions and non-academic sanctions in accordance with applicable regulations.

Keywords : *Political participation, political education*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Membangun Kesadaran Partisipasi Politik Mahasiswa Sebagai Upaya Implementasi Pendidikan Politik”** ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Ternate.

Dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ridha Ajam. M.Hum selaku Rektor Universitas Khairun.
2. Bapak Dr. Abdul Ma'sud S.Pd. M.Pd selaku Dekan FKIP Universitas Khairun.
3. Bapak Dr Ade Ismail. M.Si selaku pembantu Dekan Bidang Akademik yang telah memberikan izin penelitian di program studi PG-PAUD FKIP Universitas Khairun.
4. Bapak Dr. Rustam Hasyim, S.Pd., M.Hum selaku ketua Jurusan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun.

5. Bapak Dr. Wahyudin Noe, S.Pd, M.Pd selaku Koordinator program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun.
6. Bapak Dr. Mohtar Kamisi, S.Pd., M.Si selaku pembimbing satu yang telah memberikan saran dan arahan sehingga skripsi ini dapat selesai
7. Bapak Drs. Mukhtar Yusuf, M. Si selaku pembimbing dua yang bersedia meluangkan waktu dan turut membantu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Jainudin Abdullah, S.Pd., M.Pd selaku penguji utama. Bapak Dr. Wahyudin Noe, S.Pd., M.Pd dan Nani I Rajaloe, S.Pd., M.Pd. selaku anggota penguji yang banyak memberikan masukan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staff program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Khairun yang telah banyak membantu penulis terkait hal-hal akademik serta telah berjasa memberikan banyak ilmu kepada penulis.
10. Teristimewah kepada kedua orang tua tercinta, Saiful M. Sangaji dan Salbia Ahad. Terimah kasih atas segala nasehat, didikan dan kasih sayang, serta kerja keras tak kenal lelah sehingga penulis bisa sampai berada pada tahap ini, mimpi dan cita-cita.
11. Saudari penulis M.Rizkan Saiful, Aprilia Saiful dan Astika Saiful yang selalu menjadi tempat berbagi segala suka dan duka, menjadi partner

belajar saling berbagai ilmu. Terimah kasih selalu mendukung dan percaya pada mimpi-mimpi penulis.

12. Sahabat baikku dari semasa kecil hingga saat ini, Suci Yarni Bahrin, Julifka Biddo, Suriska Bahrudin, Fitria Ijas, Julia Biddo. Sekaligus sepupuh penulis Yang selama ini selalu setia menjadi teman berbagi cerita, menghibur dikala rasa penat dan lelah. Tak henti-hentinya selalu memberikan motivasi serta semangat setiap saat.
13. Sahabat baikku Umiyanur Latuamuri, Saira Yasin, Nurhijra Siddik, Hidi Diana Lahu, Defita Lukman, Rayanti Amrin, yang telah menemani penulis melewati masa-masa sulit selama empat tahun menjalani perkuliahan.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimah kasih untuk kerja samanya, info perkuliahan dan banyak moment indah dan berkesan yang dilewati bersama.
15. Almamater tercinta Universitas Khairun Ternate tempat penulis menimba ilmu.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih perlu banyak penyempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terakhir, harapan penulis semoga Skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi setiap orang yang membacanya,.

Ternate, 20 Januari 2023
Penulis

Salti Saiful

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
A. Konsep kesadaran partisipasi politik.....	6
1. Pengertian partisipasi politik.....	6
2. Kesadaran partisipasi politik	8
3. Bentuk-bentuk partisipasi politik	10
4. Indicator partisipasi politik.....	13
5. Sifat partisipasi politik	14
6. Landasan partisipasi politik.....	15
7. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.....	16
B. Konsep implementasi pendidikan politik.....	17
1. Pengertian Implementasi	17
2. Pendidikan Politik	19
3. Fungsi Pendidikan	22
4. Tujuan Pendidikan Politik.....	23

5. Bentuk Pendidikan Politik.....	24
6. Dimensi Pkn	26

BAB III METODE PENELITIAN37

A. Tempat dan Waktu Penelitian	37
B. Metode Penelitian.....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisa Data.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....44

A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan.....	53

BAB V PENUTUP60

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA67

DAFTAR LAMPIRAN70

Lampiran 1. Kisi-kisi wawancara	70
Lampiran 2. Pedoman wawancara	72
Lampiran 3. Dokumentasi	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa sebagai insan akademis yang terdidik ikut andil dalam memikul tanggungjawab untuk terus berupaya memajukan bangsa dan negaranya. Mahasiswa juga merupakan sebuah lapisan masyarakat yang tergolong intelektual serta dianggap mampu berfikir rasional dan ilmiah. Di sisi lain mahasiswa dapat berperan sebagai kontrol sosial, kelompok penekan (*pressure group*), pembela hak rakyat serta pemberi solusi dalam berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat salah satu cara untuk melakukan peranan tersebut adalah melalui partisipasi dalam kegiatan Pendidikan politik. Dengan demikian maka pemahaman mahasiswa tentang pendidikan politik menjadi sangat penting.

Perlu usaha sadar yang dilakukan untuk membuka wawasan dan cakrawala khususnya tentang pemahaman peran, kesadaran dan tanggungjawab sebagai mahasiswa dalam menentukan pilihannya agar tidak salah dalam mengimplementasikannya melalui pendidikan politik. Pendidikan politik bagi mahasiswa juga berperan sebagai upaya untuk mendapatkan informasi, wawasan dan kecakapan politik. Sehingga mahasiswa mampu berfikir secara objektif dan kritis analogis dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Wawasan tentang hal ini sangat penting dimiliki oleh mahasiswa dalam rangka untuk mengenali hak-hak dan kewajibannya. Selanjutnya ketika mahasiswa mengetahui hak-haknya diharapkan mampu berpartisipasi aktif untuk menegakkan keadilan dan

demokrasi yang bermartabat. Mahasiswa sering mendapat sebutan sebagai agent of control yang memiliki peran untuk mengawal segala jenis kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi yang lain mahasiswa juga dapat disebut sebagai kontrol sosial atau sering disebut sebagai kelompok tengah (*midle class*). Posisi kelas tengah ini artinya mahasiswa berada pada posisi pertengahan antara penguasa dan masyarakat. Sehingga posisi mahasiswa ini sangat strategis keterlibatannya dalam kegiatan partisipasi politik.

Partisipasi politik merupakan bagian penting penerapan konsep demonstrasi mahasiswa. Partisipasi politik mahasiswa dalam kegiatan kampus menjamin terpenuhinya hak sebagai mahasiswa dalam kehidupan kampus. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta dalam aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih atau membuat kegiatan debat politik secara langsung atau tidak langsung. Memengaruhi kebijakan kampus. Partisipasi politik mahasiswa juga suatu tindakan yang dilakukann demi mencapai kepentingan umu. Berdasarkan nilai-nilai legal.

Dapat kita lihat bahwa partisipasi menjadi sangat penting dalam proses kegiatan kampus. Tentunya proses partisipasi politik ini sendiri bisa dilihat dari situasi kegiatan kampus, yang dilakukan oleh mahasiswa. Jika dilihat dari situasi mahasiswa saat ini kesadaran akan berpartisipasi dalam kegiatan kampus sangatlah rendah, mahasiswa tidak mau tahu dan tidak peduli akan pentingnya kegiatan debat politik dan semacamnya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti partisipasi politik mahasiswa PPKn FKIP Unkhair masih sangat rendah. Rendahnya partisipasi politik mahasiswa

tersebut diantaranya dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya seperti kurangnya motivasi yang tumbuh dari diri mahasiswa, sosialisasi dan pengaruh aktor dalam kontestasi politik yang ada. Hal ini dinyatakan bahwa rendahnya partisipasi politik mahasiswa karena kurang nya kesadaran dalam diri mahasiswa.

Melihat berbagai permasalahan yang telah dibahas di atas dengan berlandaskan motivasi untuk mempersiapkan kedepannya lebih baik serta menjaga agar partisipasi politik dapat berjalan dengan baik, maka alasan serta motivasi mahasiswa yang terkait dengan pendidikan politik sangat penting untuk diidentifikasi, dengan hal tersebut diharapkan dapat dihasilkan formulasi yang tepat untuk memaksimalkan peran serta partisipasi politik mahasiswa. Untuk dapat melakukan identifikasi peran pendidikan politik bagi mahasiswa khususnya mahasiswa FKIP Universitas Khairun Ternate Jurusan IPS Prodi PPKn sebagai upaya peningkatan partisipasi politik, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Membangun Kesadaran Partisipasi Politik Mahasiswas Sebagai Upaya Implementasi Pendidikan Politik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya Pemahaman mahasiswa jurusan IPS Prodi PPKn terhadap partisipasi politik
2. Kurangnya kesadaran mahasiswa jurusan IPS Prodi PPKn terhadap partisipasi politik

3. Minimnya partisipasi politik mahasiswa di jurusan IPS Prodi PPKn.

C. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat membatasi masalah yaitu pada :

Membangun Kesadaran Partisipasi Politik Mahasiswa Sebagai Upaya Implementasi Pendidikan Politik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan identifikasi dan fokus penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa PPKn tentang partisipasi politik ?
2. Bagaimana upaya membangun kesadaran partisipasi politik mahasiswa Sebagai bentuk Implementasi Pendidikan Politik ?
3. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa PPKn sebagai perwujudan warganegara yang baik ?

E. Tujuan penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki suatu tujuan, karena tujuan menjadi tolak ukur dari suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui pemahaman mahasiswa PPKn tentang partisipasi politik
2. Mengetahui upaya membangun kesadaran partisipasi politik mahasiswa sebagai bentuk implementasi pendidikan politik

3. Mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa PPKn Seabagai perwujudan warga negara yang baik

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang Ilmu pengetahuan Sosial, serta menambah khazanah pengetahuan pada umumnya.

2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai bahan informasi untuk belajar memahami partisipasi politik sebagai upaya pendidikan politik
- b. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang partisipasi politik mahasiswa.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dengan subjek yang sama hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kesadaran Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Kata partisipasi merupakan merupakan hal tentang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau berperan serta. Peran politik terkait erat dengan aktivitas-aktivitas politik, mulai dari peranan para politikus profesional, pemberian suara, aktivitas partai, sampai administrasi. Dalam pengertian umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilu, menjadi anggota suatu partai dan lain sebagainya.

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. (Herbert McClosky, 1988)

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga (*privat citizen*) yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang bertujuan mempengaruhi keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal.

Budiarjo mendefinisikan bahwa : "partisipasi politik sebagai kegiatan individu atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan

politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakann pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindak seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapr umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Sementara Conway (widjanatrko) mengatakan bahwa terminology partisipasi politik memiliki makna sebagai upaya warga Negara dalam mempengaruhi dan memilih struktur otoritas dan kebijakan pemerintah. Definisi ini menunjukkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan langsung oleh warga Negara.

Beberaapaa aspek penting yang perluh diperhatikan adalah partisipasi politik bukan semata sikap-sikap, namun merupan kegiatan-kegiatan yang bersifat empiris, merupakan kegiatan warga negara asli, bukan individu-individu yang bermaain di wilayah pemerintahan: pokok perhatiannya adalah kegiatan yang memperdulikan berhasil atau tidaknya tujuan yang hendak di capai, yaitu mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintahan.

Sementara itu Dalton mengatakan “*we ca organize potential of participation into three grouping: personal characteristics, group effects, and political attitudes*”. Ini menunjukkan adany keterkaitan partisipasi politik dengan karakteristik perrsoal, pengaruh kelompok dan sikap politik.(Priambodo, 2000)

Dari definisi-definisi tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan bahwa partisipasi politik pada mahasiswa adalah suatu kegiatan sukarela individu ataupun kelompok mahasiswa, baik langsung maupun tidak langsung, untuk aktif dalam kehidupan politik yang bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah, pembentukann kebijakan umum, dan semua bentuk aktivitas yang di maksud mempengaruhi pemerintahan.

Kegiatan tersebut adalah pemberiann suara dalam pemilu, keikutsertaan dalam pemilu kampanye politik, kegiatan debat politik, menjadi suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pemerintahan, dan kritik terhadap kebijakannya.

2. Kesadaran Partisipasi Politik

Menurut Hasibuan, “kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “kesadaran adalah keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang”. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajibannya yang harus dijalankannya. (Hasibuan, 2012:193)

Kesadaran mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan himapro jurusan IPS Prodi PPKn tidaklah serta merta didasari atas kehendak pribadi secara total, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar mahasiswa jurusan PPKn melakukan pencoblosan karena kehendak pribadi atau tidak adanya satu paksaan maupun kegiatan partisipasi politik lainnya, namun perlu diperhatikan bahwa

munculnya kehendak pribadi untuk melakukan pencoblosan maupun kegiatan politik lainnya merupakan respon dari ketiakpuasan itu sendiri. Adanya berbagai harapan yang di inginkan oleh partisipasi ini tentu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sehingga mempengaruhi kesadaran partisipasi.

a) Hakikat Kesadaran

Secara arafiah kata kesadaran berasal dari kata sadar, yaitu berarti insyaf, merasaa tahu dan mengerti, jadi kesadaran adalah keadaan seseorang yang tahu/mengerti dengan jelas apa yang ada dalam pikirannya. Pikiran bisa diartikan dalam banyak makna, seperti ingatan hasil berpikir, akal, gagasan ataupun maksud/niat. Kita sadar jika orang tahu, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu. Dengan demikian kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti tentang segala sesuatu. AW Widjaya (1984:46).

Kesadaran Partisipasi politik dilingkungan kampus merupakan keadaan individu mahasiwa yang menyadari pentingnya sebuah pembelajaran pendidikan politik. Kesadaran ini membuat keseimbangan terhadap berbagai masalah sosial. Kesadaran politik mahasiswa tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan pemilihan ketua himapro jurusan IPS Prodi PPKn. Akan tetapi juga dari peran serta mereka dalam mengawasi atau mengoreksi kebijakan dan perilaku ketua selama memegang kekuasaan ketua jurusan. Kesadaran politik dapat tercipta salah satu nya melalui sosialisasi politik (political socialization). “Sosialisasi politik adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap

gejala-gejala politik. Dalam bukunya Michale rush & philipp althoff yang berjudul “pengantar sosiologi politik” (2003:25). Mengklasikasikan tingkat kesadaran, Sbb:

1. Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya.
2. Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar orientasi motivasi yang beraneka ragam sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi.
3. Kesadaran yang bersifat autonomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seseorang.

Adanya kesadaran politik pada mahasiswa diharapkan mereka tidak hanya menjadi penonton (onlookers) melainkan menjadi anggota masyarakat yang memiliki partisipasi politik yang tinggi, itu berarti mereka harus ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan. Dan secara langsung, atau tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan pemerintah aktif dalam kehidupan politik tidak diartikan bahwa mahasiswa harus terjun langsung berpolitik praktis. Melainkan ikut berproses mengembangkan diri dalam organisasi-organisasi mahasiswa.

3. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala Negara.

Identifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi
- c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik
- d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik
- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik
- f. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi
- g. Partisipasi dalam diskusi politik internal

Partisipasi politik memiliki banyak bentuk atau jenis. Namun setidaknya ada dua bentuk umum dari partisipasi politik. Berikut penjelasannya

- a) Partisipasi aktif : adalah bentuk partisipasi politik yang dilaksanakan dengan pengajuan usul mengenai kebijakan umum beserta pilihan alternatifnya. Selain itu, partisipasi politik secara aktif juga dilakukan dengan melakukan kritik serta perbaikan atas berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, membayar pajak dan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.
- b) Partisipasi pasif : adalah bentuk partisipasi yang dilakukan dengan menaati, menerima, serta melaksanakan saja seluruh keputusan pemerintah. Artinya masyarakat hanya sekadar menerima dan mengikuti saja tanpa menyatakan pengajuan usul ataupun kritik.

Bentuk-bentuk dan frukuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga Negara. Bentuk –bentuk partisipasi politik dapat dilihat pada table berikut :

Konvensional	Non-konvensional
• Pemberian suara (<i>voting</i>) • Diskusi politik • Kegiatan kampanye • Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan • Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative	• Pengajuan petisi • Berdemonstrasi • Konfrontasi • Mogok • Tindak kekerasan politik terhadap harta-benda (perusakan, pengeboman, pembakaran) • Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) • Perang gerilya dan revolusi

Bentuk-bentuk partisipasi dalam kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, pemberian suara, kegiatan kampanye, dan lain-lain termasuk kegiatan partisipasi aktif. Sedangkan, bentuk partisipasi horizontal dan vertical lebih mengarah pada partisipasi dalam hubungan antar sesama warga dalam proses pembangunan , partisipasi politik tidak lepas dari proses sosialisasi politik yang dapat meningkatkan peran masyarakat.

4. Indikator Partisipasi Politik

Indikator partisipasi politik sebenarnya merupakan petunjuk yang relative konkrit tentang adanya kesadaran politik atau melek politik sebagai akibat dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan dan politik tertentu. Kesadaran politik atau melek politik yang kemudian menimbulkan partisipasi politik masyarakat menjadi petunjuk mengenai taraf kesadaran masyarakat akan peranan kewajibannya. Partisipasi politik berkaitan erat dengan adanya kesadaran politik atau bisa juga disebut melek politik. Dalam hal ini, tingkat melek politik masyarakat akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Melek politik memiliki indikator antara lain ; pengetahuan konstitusi dan sistem parpol, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku politik tertentu sebagai upaya partisipasi politik diatur didalam konstitusi; pemahaman politik, artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan politik tertentu, terutama dari segi isinya; sikap politik artinya seseorang mempunyai sifat kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap perilaku politik; perilaku politik artinya seseorang berperilaku sesuai dengan konstitusi dan sistem politik yang berlaku. Dengan demikian melek politik sama dengan kesadaran hukum atau konstitusi.

Pendapat tersebut mengacu pada pendapat *B. Kutsneky (Soekanto, 2008 : 159)* tentang indikator kesadaran hukum, yaitu ;

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hokum (*Law awareness*);
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan Hukum (*Law acquaintance*);
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hokum (*legal attitude*);

d. Pola-pola perikelakuan Hukum (*Legal behavior*)

Pengetahuan politik tidak mempengaruhi secara positif maupun negative pada partisipasi politik masyarakat. Demikian pula dengan pengetahuan tentang isi konstitusi sukar sekali menemukan derajat partisipasi politik masyarakat, karena teladan dari elit politik dan mekanisme politik juga menentukan. Mengacu pada pendapat diatas, sebagai indikator partisipasi politik yaitu;

- a. Pengetahuan sistem politik
- b. Pemahaman politik
- c. Sikap dan perilaku politik.

Indikator partisipasi politik tidak selalu berkorelasi, karena ada kala nya orang yang mengerti politik, sikap dan perilaku nya bertentangan dengan sistem politik yang berlaku, dia memahami dan mengetahui aturan yang berlaku namun dia melanggar, tidak mentaati atau memahami sistem politik tersebut.

5. Sifat Partisipasi Politik

Menurut Huntington & Nelson Partisipasi Politik Dapat Bersifat Otonomi Dan Mobilisasi.

1. Partisipasi Politik yang bersifat otonom (*autonomous participation*) yaitu partisipasi politik yang didasarkan pada kesadaran politik setiap warga untuk menentukan pilihan.
2. Partisipasi politik yang memobilisasi (*mobilized participation*) yaitu partisipasi politik yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain.

Partisipasi politik otonomi dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran politik setiap orang tanpa adanya paksaan, ancaman ataupun pengerahan partisipasi

politik otonom murni muncul atas dorongan atau kehendak pribadi. Sedangkan partisipasi politik yang dimobilisasi merupakan partisipasi politik yang dilakukan oleh karena dikerahkan. Biasanya partisipasi yang dimobilisasi tidak berdasarkan pada kesadaran pribadi, tetapi terjadi melalui paksaan, ancaman bahkan tindakan kekerasan lainnya dengan maksud mengubah pilihan warga. Budiardjo (2014: 370).

6. Landasan Partisipasi Politik

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington & Nelson (20014; 9-10) membagi landasan partisipasi politik ini menjadi :

1. Kelas individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
2. Kelompok atau komunal individu-individu dengan asal usul ras, agama, bahasa, atau etnis serupa.
3. Lingkungan individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.
4. Partai individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan control atas bidang-bidang eksekutif dan legislative pemerintahan, dan
5. Golongan atau faksi_ individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan

patron-client yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

7. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Milbrath, sebagaimana dikutip Maran (2001:156)-157).

Menyebutkan 4 Faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, adalah :

1. Adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.
 Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui massa media atau melalui diskusi formal.
2. Faktor karakteristik pribadi seseorang, orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik ekonomi dan lain-lain nya biasanya mau terlibat aktifitas politik.
3. Faktor karakteristik sosial seseorang, karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang, bagaimana pun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi , sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan social yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lainnya, tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Dan untuk itulah mereka berpartisipasi dalam kehidupan politik.
4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan

politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Tetapi peningkatannya jumlah pemberi suara secara dramatis di Negara-negara bagian selatan amerika akhir-akhir ini betul-betul akibat dari adanya registrasi yang rapidan aktifitas pemberian suara di kalangan golongan rakyat berpenghasilan rendah yang secara tradisional apatis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, dapat disimpulkan bahwa menurut mereka faktor-faktor yang juga sangat partisipasi politik adalah: tingkat pendidikan, jenis kelamin, status sosial ekonomi seseorang, peran partai politik, aktivitas kampanye, calon-calon/tokoh politik yang memiliki daya tarik pribadi kuat (kharismatis).

B. Konsep Implementasi Pendidikan Politik

1. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh solichin Abdul Wahab (2004) (Webster dalam Wahab (2004:64) adalah :

Konsep implemnetasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)

Impelemntasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Wahab dalam bukunya yang berjudul analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara (2001) dalam Wahab (2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut:

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang di arahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas , dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dan program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

2). Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah usaha atau upaya berupaya bimbingan atau pembinaan secara disengaja dan sistematis dalam meningkatkan pengetahuan

politik sehingga mencintai dan memiliki keterikatan yang tinggi terhadap bangsa dan negaraa menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik agar mampu berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan politik. Pendidikan politik merupakka suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sisitematis dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, symbol, nilai-nilai, dan norma-norma politik dari suatu generasi ke generasi selanjutnya.manfaat pendidikan politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik , lembaga-lembaga politik , lembaga-lembaga pemerintahan.

Berikut definisi dan pengertian pendidikan politik dari beberpa sumber buku:

- a) Menurut alfian 919810, pendidikan politik adalah usaha untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.
- b) Menurut kartonno (2009), pendidikan politik upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk partsipasi individu agar mampu partisipasi yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik.
- c) Menurut kartaprawira (1988), pendidikan politik merupakan upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secaraa maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan

paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat mampu menjalankan tugas partisipasi.

- d) Menurut Djahiri (1996), pendidikan politik atau bimbingan , pembinaan warga negara untuk memahami mencintai dan memiliki keterikatan diri (sense of belonging) yang tinggi terhadap bangsa Negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada.

Pendidikan politik di indonesia secara edukatif merupakan upaya yang sistematis untuk memantapkan kesadaran politik dan bernegara untuk menjaga kelestarian pancasila dan UUD N RI Tahun 1945. Jadi, pendidikan politik di sesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta yang menjadi landasan moral bangsa. Hal ini dapat di lihat dalam intruksi presiden nomor 12 Tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi Muda sebagai Berikut :

Pada prinsipnya pendidikan politik bagi generasi mudah merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian pancasila dan undang-undang dasar 1945 sebagai budaya bangsa.

Perilaku politik yang lahir dari sebuah proses pendidikan politik dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang dipengaruhi pula oleh interaksi sosial setiap individu. Dalam proses tersebut mengandung nilai-nilai tertentu secara normative diyakini dan di laksanakan oleh setiap individu. Konsep pendidikan politik dan sosialisasi politik, memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat

digunakan secara bergantian. Sosialisasi politik sebagai suatu proses belajar tentang politik.

Menurut surbakti Ramlan (2015 :117), dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik bahwa:

Sosialisasi politik dibagi dua yaitu :

pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialog diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik .

Pendapat di atas secara tersirat menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

David Easton dan jack dennis (AlMuchtar, 2009 ; 39) dalam bukunya *children in the political system* memberikan batasan mengenai *political socialization* yaitu bahwa “*political socialization is development process which*

person acquire orientation and patterns of behaviour". Sedangkan Ferdinand I. dalam bukunya *political socialization* berpendapat bahwa:

Socialization politik adalah semua pembelajaran politik formal dan informal deliberat dan unplanned, pada setiap tahap siklus hidup yang masuk tidak hanya eksplisit politikal yang menyembuhkan tapi juga pembelajaran nonpolitik secara nominal dari sikap politik yang memiliki sikap sosial yang relevan dan pengakuan karakteristik kepribadian yang polar secara relative. Greenstein (Al Muchtar, 2009 : 39)

3. Fungsi Pendidikan Politik

Fungsi pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam satu sistem politik. Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan, jadi, fungsi dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai peranannya dalam sistem politik.

Fungsi yang disampaikan diatas lebih menonjolkan fungsi pendidikan politik dalam mengubah tatanan masyarakat yang ada menjadi lebih baik dan lebih mendukung tercapainya proses demokrasi, sedangkan fungsi pendidikan politik bagi individu antara lain adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak

dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial dan kedurjanaan.

- b. Mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan ditengah masyarakat.

Fungsi pendidikan diatas tidak hanya mengubah individu tapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa seseorang individu dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang poltik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan sikap dan perilaku politik yang lebih luas dalam usahannya untuk mencapai tujuan politik.

4. Tujuan Pendidikan Politik

Tujuan utama pendidikan politik agar setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Adanya pendidikan politik agar setiap individu tidak hanya sekedar tahu saja tapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga Negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik. Pendidikan politik dilakukan pada seluruh warga masyarakat tidak terkecuali pada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Tujuan diadakannya pendidikan politik secara formal terdapat dalam impress No 12 Tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda yang menyatakan bahwa :

Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Pemaparan tujuan pendidikan politik diatas, penulis berpendapat bahwa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan politik adalah agar generasi muda dan masyarakat saat ini memiliki kemampuan untuk memahami situasi sosial politik yang penuh konflik. Aktivitas yang dilakukan pun diarahkan pada proses demokrasi serta berani bersikap kritis terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya. Dari tujuan pendidikan politik diatas, dapat dilihat bahwa antara tujuan pendidikan politik dan fungsi yang dimilikinya hampir sama. Tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan politik merupakan keberhasilan dari diadakannya pendidikan politik itu sendiri. Kartono (2015:19)

5. Bentuk Pendidikan Politik

Pendidikan politik tidak akan terlaksanakan tanpa adanya penyelenggaraan yang dilakukan secara nyata di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan politik tentunya akan berkaitan erat dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan ditengah-tengah masyarakat tersebut. Dengan demikian bentuk pendidikan politik mana yang akan diterapkan dalam mendukung terlaksanannya pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah suatu Negara, pada

umumnya sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan didalam sebuah Negara.

Pendidikan politik dapat diberikan melalui berbagai jalur. Pemberian pendidikan politik tidak hanya dibatasi oleh lembaga seperti persekolahan atau organisasi saja. Namun diberikan melalui media, misalnya media cetak dalam bentuk artikel. Semua bentuk pendidikan politik sebenarnya tidak jadi persoalan, artinya semua nya baik asalkan mampu memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidika tersebut dapat merubah individu yang memiliki kecintaan terhadap bangsanya atau memiliki rasa keterikatan diri (sense of belonging) yang tinggi terhadap bangsa Negara.

Pendidikan politik menurut kantaprawiraa (2014:56) terdapat beberapa dapat bentuk penyelenggaraan pendidikan politik yang dapat dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah , dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
- b. Siaran radio dan televisive serta film (audio visual media)
- c. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat penyampaian khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

Berdasarkan pendapat diatas dapat kita lihat bahwa pendidikan politik dapat ditempuh melalui berbagai jalur. Pemberian pendidikan politik tidak hanya di batasi oleh lembaga persekolahan atau organisasi saja. Namun dapat juga melalui media masa baik media cetak maupun media elektonik. Keseluruhan bentuk atau

jalur pendidikan politik diatas yang terpenting adalah bahwa pendidikan politik tersebut mampu untuk memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik mampu menuju pada arah yang tepat yaitu meningkatkan daya fikir dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah politik.

6. Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 dimensi yaitu :

- a. Dimensi pengetahuan kewarganegaraan atau (*civics knowledge*) mencakup politik, dan moral. Dimensi keterampilan kewarganegaraan atau (*civics skill*)
- b. meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civics values*)

diantaranya mencakup : percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religious, norma, dan moral.

Ketiga dimensi kajian dimaksud akan berkait erat dengan lingkup bahasan materi pendidikan kewarganegaraan.

a. Pengetahuan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau isi apa saja yang seharusnya diketahui oleh warga negara. *Civic knowledge* berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga Negara.

National center for learning and citizenship (NCLC) dalam Winarno (2012:108) menyatakan, *civic knowledge* berisikan item pernyataan yang berkaitan dengan sejarah dan pengetahuan kontemporer, seperti pemahaman tentang struktur dan mekanisme pemerintahan konstitusional dan prinsip-prinsip yang melandasinya.

Adapun komponen pengetahuan kewarganegaraan menurut John J. Patrick dan Thomas S. Vont sebagai berikut.

Table : pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*)

1.	Mengidentifikasi dan menggambarkan fenomena (kejadian/isu) politik, kewarganegaraan
2.	Menganalisis dan menjelaskan fenomena
3.	Mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan posisi pada acara dan isu public
4.	Berpikir kritis tentang kondisi kehidupan masyarakat
5.	Berpikir secara konstruktif tentang bagaimana memperbaiki kehidupan politik/masyarakat

1. *Civic Knowledge* dalam PKN Sekolah

Berdasarkan Permendiknas No.22 Tahun 2006, secara tersirat pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) terjabar ke dalam dan mencakup pengetahuan mengenai 8 ruang lingkup kajian, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa; norma; hukum; dan peraturan; Hak Asasi Manusia; Kebutuhan Warga Negara; Konstitusi Negara; Kekuasaan dan Politik; Pancasila; dan Globalisasi. Untuk menunjukkan

mana-mana kajian yang masuk dalam ranah pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), dapat diidentifikasi dari rumusan kompetensi dasar dari ruang lingkup tersebut. Setiap kompetensi dasar memuat kata “kerja operasional” yang dapat dikenalnya sebagai bagian dari apakah termasuk dalam ranah kognitif, afektif, atau psikomotor.

2. Pembelajaran PKn untuk *Civic Knowledge*

Penting bagi guru PKn untuk memahami bagaimana menentukan dan mendesain model pembelajaran yang mampu mengembangkan pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan (*civic knowledge*). Dengan kata lain bagaimana merancang pendekatan, strategi, metode, maupun teknik yang dapat mengembangkan ranah kognitif siswa. Model pembelajaran PKn harus disesuaikan dengan tujuan mata pelajaran PKn, yaitu siswa mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif; berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas; berkembang secara positif dan demokratis dan mampu berinteraksi dalam hubungan antar warga.

b. Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*)

Kompetensi esensial kedua dari kata civic education (pendidikan kewarganegaraan) dalam masyarakat demokratis adalah keterampilan kecakapan-kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*).

Branson (1998:17) dalam Winarno (2012:145) menyatakan sebagai berikut.

Jika warga Negara mempraktikkan hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya

perlu menguasai pengetahuan dasar sebagaimana diuraikan di muka, namun mereka perlu memiliki kecakapan-kecakapan yang intelektual dan partisipatoris yang relevan. Kecakapan-kecakapan intelektual kewarganegaraan sekalipun dapat dibedakan namun satu sama lain tidak dapat dipisahkan dari kontennya. Kecakapan berpikir kritis tentang isu politik tertentu.

Kecakapan-kecakapan intelektual yang penting untuk seorang warga Negara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab, disebut sebagai kemampuan berpikir kritis. Kecakapan intelektual itu meliputi kemampuan mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, menilai, mengambil dan mempertahankan posisi atas suatu isu Branson (1998) dalam Winarno (2012:146).

Table : kecakapan-kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*)

Kecakapan Intelektual <i>(intellectual skills)</i>	Mengidentifikasi (<i>identifying</i>) Menggambarkan (<i>describing</i>) Menganalisis (<i>analyzing</i>) Menilai (<i>evaluating</i>) Mengambil dan mempertahankan posisi atas suatu isu (<i>taking and defending positions on public issue</i>)
Kecakapan partisipatoris <i>(participatory skills)</i>	Berinteraksi (<i>interacting</i>) Memantau (<i>monitoring</i>) Memengaruhi (<i>influencing</i>)

Keterampilan kewarganegaraan disebutkan meliputi keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), keterampilan mempengaruhi dan memonitoring jalannya pemerintah dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah sosial, keterampilan menagadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik.

1. *Civic Skills* dalam PKn

Keterampilan kewarganegaraan disebutkan meliputi keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), keterampilan memengaruhi dan memonitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik. Yang di maksudkan *civic skills* dalam buku terbitan Diknas tersebut adalah *participatory civic skills*. Sedangkan untuk keterampilan intelektual kewarganegaraan adalah keterampilan intelektual yang rujukan materinya bersumber pada pelajaran Kewarganegaraan.

Diknas (2004) dalam Winarno (2012:161) Udin S. Winataputra dalam Winarno (2012:161-163) melalui hasil penelitiannya mengidentifikasi adanya butir-butir dari komponen keterampilan/kecakapan kewarganegaraan. Butir-butir kecakapan kewarganegaraan yang disajikan ini dapat dipakai sebagai rujukan bagi materi mata pelajaran PKn baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia. Butir-butir tersebut sebagai berikut.

- a) Kemampuan berkomunikasi secara argumentatif dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar atas dasar tanggung jawab sosial.
- b) Kemampuan berorganisasi dalam lingkungan sekolah atau masyarakat secara cerdas dan penuh tanggung jawab personal dan sosial.
- c) Kemampuan berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat secara cerdas dan penuh tanggung jawab personal dan sosial.
- d) Kemampuan mengambil keputusan individual dan atau kelompok secara cerdas dan bertanggung jawab.
- e) Kemampuan melaksanakan keputusan individual dan atau kelompok sesuai dengan konteksnya secara bertanggung jawab.
- f) Kemampuan berkomunikasi secara cerdas dan etis sesuai dengan konteksnya.
- g) Kemampuan memengaruhi kebijakan umum sesuai dengan norma yang berlaku dan konteks sosial-budaya lingkungan.
- h) Kemampuan membangun kerja sama dengan dasar toleransi, saling pengertian, dan kepentingan bersama.
- i) Kemampuan berlomba-lomba untuk berprestasi lebih baik dan lebih bermanfaat.
- j) Kemampuan turut serta aktif membahas masalah sosial secara cerdas dan bertanggung jawab.
- k) Kemampuan menentang berbagai bentuk pelecehan terhadap keterampilan warga negara (*civic skills*) dengan cara yang dapat diterima secara sosial-budaya.

- l) Kemampuan turut serta mengatasi konflik sosial dengan cara yang baik dan dapat diterima.
- m) Kemampuan memimpin menganalisis masalah sosial secara kritis dengan menggunakan aneka sumber yang ada.
- n) Kemampuan memimpin kegiatan kemasyarakatan secara bertanggung jawab.
- o) Kemampuan memberikan dukungan yang sehat dan penuh tanggung jawab kepada calon pemimpin dalam lingkungannya.
- p) Seseorang dapat memiliki kemampuan memberikan dukungan yang sehat dan tulus terhadap pemimpin yang terpilih secara demokratis.
- q) Kemampuan menunaikan berbagai kewajiban sosial sebagai anggota masyarakat dengan penuh kesadaran.
- r) Kemampuan membangun saling pengertian antar suku, agama, ras, dan golongan guna memelihara keutuhan dan semangat kekeluargaan.
- s) Kemampuan berusaha membangun saling pengertian antar bangsa melalui berbagai media komunikasi yang tersedia.
- t) Kemampuan berusaha untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan kegiatan sosial budaya dengan kesadaran untuk berbuat lebih baik.

Dari kedua pendapat tersebut, kita bisa membuat perbedaan civic skills dalam pengertian luas dan sempit. Secara luas, civic skills mencakup *intellectual civic skills* dan *participatory civic skills*. Sedangkan secara sempit yang di maksud *civic skills* adalah *participatory civic skills* atau keterampilan kewarganegaraan, seperti

dicontohkan Buku Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Diknas (2004)

2. pembelajaran PKn untuk *Civic Skills*

Kecenderungan pembelajaran PKn yang hanya berorientasi pada pemahaman akan civic knowledge perlu diubah, apalagi sebatas mengajarkan konsep-konsep keilmuan PKn yang sifatnya hafalan. Oleh karena itu, orientasi pada *civic knowledge* harus dilanjutkan pada pengembangan sub ranah intellectual civic skills yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan *civic knowledge*.

Ranah keterampilan kewarganegaraan bila disandingkan dengan pengelompokan Benjamin S. Bloom dalam Winarno (2012:167) tentang taksonomi pembelajaran, maka ia sejajar dengan aspek psikomotorik. Meskipun sejajar, namun tetap perlu dibedakan. Dalam taksonomi Bloom, yang dimaksud ranah psikomotor adalah hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Padahal keterampilan kewarganegaraan yang dimaksud bukanlah keterampilan dengan kekuatan fisik, tetapi lebih pada keterampilannya berpartisipasi pada kehidupan publik sebagai bentuk dari tanggung jawab kewarganegaraannya.

c. Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*)

Komponen mendasar ketiga dari civic education adalah watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi

konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari pada yang dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) menunjuk pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Secara singkat karakter publik dan privat itu dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel : Ciri-ciri Watak Kewarganegaraan (*civic disposition*)

1. Menjadi anggota masyarakat yang independen.
2. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.
2. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.
4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana.
5. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

Pentingnya watak kewarganegaraan ini jarang sekali ditegaskan. Karakter publik dan privat yang mendasari demokrasi, dalam jangka panjang, mungkin lebih merupakan dampak dari pengetahuan atau kecakapan yang dikuasai warga negara. Hakim Learned Hand dalam pidatonya di New York (1994) dalam

Margaret S. Branson, dkk (1999:26) mengungkapkan pentingnya watak kewarganegaraan ini dalam kata-katan yang sekarang jadi populer, yaitu:

“kebebasan terletak pada hati manusia, baik pria maupun wanita. Bila ia sirna maka tak ada konstitusi, hukum, dan pengadilan yang dapat menyelamatkannya. Bahkan konstitusi, hukum, dan pengadilan tak dapat berbuat apa-apa. Namun bila ia masih di sana, maka tak diperlukan lagi konstitusi, hukum, dan pengadilan untuk menjaganya.”

a) Isi *Civic Disposition* dalam PKn

Berdasarkan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 dalam Winarno (2014:191) tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), kita bisa mengidentifikasi sejumlah kompetensi kewarganegaraan dalam dimensi *civic disposition*, dalam dimensi karakter kewarganegaraan, diharapkan untuk:

1. Menghargai makna nilai-nilai kejuangan bangsa.
 2. Menghargai keputusan bersama.
 3. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 4. Menghargai perbedaan dan kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat dengan bertanggung jawab.
 5. Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
 6. Menunjukkan sikap kritis dan apresiatif terhadap dampak globalisasi.
- (Budimansyah 2009:21).

BAB III

METODE PENELITIAN

A). Tempat dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di FKIP Universitas Khairun Ternate di Jalan Bandara Babullah Kampus Akehuda Kota Ternate Utara. Penelitian ini dilakukan pada bulan november tahun 2022.

B). Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan alamiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, isu tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kualitatif, dimana data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan sehingga hanya berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informasi ini dapat berupa situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Sugiyono 2018:19).

Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau *natural setting*, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh

peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relative tidak berubah.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kaulitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. (Sugiyono, 2017:9)

C). Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa jurusan IPS Prodi PPKn. Informan terdiri dari mahasiswa Angkatan 2019, 2020, 2021 dan 2022. Objek dalam penelitian ini adalah membangun kesadaran partisipasi politik mahasiswa sebagai upaya implementasi pendidikan politik.

D). Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, brebagai *sumber*, dan berbagai *cara*. Bila dilihat dari *setting-nya*, data dapat dikumpulkan pada seting alamiah (*natural setting*), pada laboraturium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan *sumber pimer*, dan *sumber sekunder*. Sumber primer adalah

sumber data yang langsung memberikan pada kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari *segi cara* atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara). Kuesioner (angket). Dokumentasi dan gabungan keempatnya. (Sugiyono, 2017:104)

1. Angket atau Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017).

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperkuat data respon mahasiswa yang telah diambil dari angket. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara penelitian dengan mahasiswa prodi PPKn. Wawancara dilaksanakan secara lisan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-

bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melui angket dan wawancara

3). Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut. Selanjutnya dicarikan lagi data secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hopotesis tersebut diterimah atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterimah, maka hipotesis berkembang menjadi teori.

diatas dapat dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katergori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan seghingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono,2017:131)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemahaman Mahasiswa PPKn Tentang Partisipasi Politik.

Pemahaman mahasiswa PPKn tentang partisipasi politik berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, selama ini telah dilakukan oleh mahasiswa Prodi PPKn, Pemahaman mahasiswa tentang partisipasi politik yaitu peran serta atau partisipasi mahasiswa dalam kehidupan kampus. Dengan jalan pemilihan ketua HMJ, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan dalam organisasi HMJ. Pemahaman partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan ketua HMJ atau dapat juga dilihat dari sosialisasi mahasiswa. Mahasiswa sering kali melakukan kegiatan pemilihan dan sosialisasi ini dapat dikatakan telah menjadi pengetahuan tentang proses sosial yang memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh pencapaian tujuan, pengertian mengenai segi yang dinamis dari mahasiswa. Dari pemahaman mahasiswa tentang partisipasi politik di lihat dari interaksi sosial yang merupakan kunci dari semua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (M. Dani Buamona) selaku mahasiswa PPKn semester VII Pada (Kamis, 3 November 2022) mengatakan bahwa pemahaman partisipasi politik di lihat dari mahasiswa yang menjalankan aktivitas dalam melakukan kegiatan pemilihan ketua HMJ dan kegiatan sosialisasi dan juga aktivitas-aktivitas lainnya dikampus, hal ini dapat mungkinkan bahwa

mahasiswa yang sering melakukan aktivitas di kampus itu mahasiswa yang merupakan dasar pengetahuan dalam proses interaksi sosial di kampus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Ikbal Yasin) Selaku mahasiswa PPKn semester VII pada (Kamis, 10 November 2022) mengatakan bahwa pemahaman mahasiswa tentang partisipasi politik yaitu kegiatan yang di kampus yang diadakan oleh mahasiswa maupun yang diikuti mahasiswa baik dari segi pemilihan ketua HMJ maupun kegiatan lainnya. Saya memahaminya bahwa partisipasi politik yang ada di kampus ini dilihat dari perilaku-perilaku mahasiswa yang menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menjalankan tugasnya di kampus sesuai dengan kebijakan yang ada di kampus. Mahasiswa yang terlihat sibuk dalam aktivitas kegiatan kampus yaitu mahasiswa yang bisa di bilang tahu dan paham betul tentang partisipasi politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (M. Rifaldi A.Djohra) selaku mahasiswa semester V pada (Jum'at, 11 November 2022) mengatakan bahwa pemahaman mahasiswa PPKn tentang partisipasi politik tidak semua mahasiswa itu paham tentang partisipasi politik tapi jika dilihat dari tindakan mahasiswa tentu sering melakukan tugas nya dan menjalankan aktivitas sesuai kebijakn kampus. Ada mahasiswa yang ketika di minta untuk melakukan sesuatu dia menolak hal ini dapat di katakan bahwa mahasiswa sepenuhnya belum memiliki pemahaman tentang partisipasi politik, namun jika kita memberikan arahan terhadap mahasiswa tersebut sebelum memintanya untuk melakukan sesuai yang diminta maka mahasiswa tersebut akan paham.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Anisa Ali) selaku mahasiswa PPKn semester V pada (Jum'at, 11 November 2022) mengatakan bahwa pemahaman mahasiswa tentang partisipasi politik. Mahasiswa itu kita tidak perlu capek-capek meminta untuk menjawab pertanyaan yang kita berikan tentang partisipasi politik cukup kita melihat apa yang dilakukannya aktivitas kegiatan lainnya dikampus, kita dapat mengetahui bahwa itulah pemahamannya dalam menjalankan aktivitasnya dikampus, maksudnya kegiatan apa saja yang dilakukan itu semua adalah politik diminta untuk mengikuti kegiatan tersebut itu dikatakan partisipasi politik, jadi yang kita lakukan itu semua dikatakan politik, jadi mahasiswa dilihat dari aktivitas yang dilakukan, atau kegiatan yang diikuti, tentu mahasiswa sudah paham.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Hariati Lutfi-Ferawati Irwan-Meidjiada Kasibit) selaku mahasiswa PPKn semester III pada (Jum'at, 11 November 2022) mengatakan bahwa pemahaman tentang partisipasi politik yaitu mahasiswa yang aktif dalam menjalankan tugasnya dan mengikuti kegiatan yang dibuat, kita tidak bisa mengatakan secara langsung bahwa kita paham tentang partisipasi, jika kita menolak ajakan dari seorang teman atau permintaan belum tentu dikatakan kita tidak paham/mengerti, tapi itu dikatakan bahwa kita berhak dalam menentukan pilihan, apakah kita mau atau tidak itu tergantung dari kita dan keadaan yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang partisipasi politik tidak selamanya dilihat dari apa yang diminta, pemahaman mahasiswa tentang partisipasi politik tentu dilihat dari tindakan dan perilaku mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa sering di lihat bahwa mahasiswa itu lebih mengarah kepada apa yang di ikutinya, jadi mahasiswa itu ketika sudah mengikuti kegiatan tersebut itu tentu mahasiswa yang paham, ada juga mahasiswa yang mengikuti kegiatan tapi tidak paham kegiatan itu, jadi harus ada arahan yang dapat menjadi sebuah petunjuk bagi mahasiswa, pemahaman tentang partisipasi politik yaitu mahasiswa yang aktif dalam mengikuti kegiatan partisipasi politik, seperti pemilihan ketua HMJ, sosialisas, dan kegiatan yang serupa lainnya, karena partisipasi politik didalamnya terdapat orang-orang yang sudah paham dan tahu kebijakannya.

2. Membangun Kesadaran Partisipasi Politik Mahasiswa Sebagai bentuk implementasi pendidikan politik

Berdasarkan hasil wawancara dengan (M.Dani Buamona) selaku mahasiswa PPKn semester VII pada (Kamis, 3 November 2022) mengatakan bahwa kesadaran partisipasi politik mahasiswa sebagai bentuk implementasi pendidikan politik dilihat dari aktifitas mahasiswa, sikap mahasiswa, sikap yang memiliki rasa yang lebih tinggi terhadap kegiatan yang ada, itu artinya mahasiswa harus mengikuti serta aktif dalam dalam kehidupan politik, membangun kesadaran

partisipasi politik mahasiswa yaitu berasal dari motivasi yang dimiliki mahasiswa tersebut untuk menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Ikbal Yasin) selaku mahasiswa PPKn semester VII pada (Kamis, 10 November) mengatakan bahwa kesadaran partisipasi politik mahasiswa sebagai implementasi pendidikan politik mahasiswa yang mengikuti suatu kegiatan berarti mahasiswa yang termotivasi dan memiliki semangat tinggi dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat dilihat dari sikapnya yang memiliki kepatuhan terhadap kebijakan yang dibuat di kampus. Semangat yang dibangun dari diri mahasiswa yaitu motivasi yang didapatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Kartika sapsuha)) Selaku mahasiswa PPKn semester V pada (Jum'at, 11 November 2022) mengatakan bahwa kesadaran partisipasi politik mahasiswa sebagai implementasi pendidikan politik dilihat dari semangat mahasiswa saat melakukan aktivitas, mengikuti kegiatan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, kesadaran partisipasi politik kesadaran partisipasi politik memiliki makna yang dapat diartikan sebagai keadaan tahu, jadi kesadaran partisipasi politik mahasiswa adalah keadaan yang dimengerti terhadap suatu persoalan dalam kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (M. Rifaldi A.Djohra) Selaku mahasiswa PPKn semester V pada (Jum'at, 11 November 2022) mengatakan bahwa kesadaran partisipasi politik mahasiswa sebagai implementasi pendidikan politik yaitu mahasiswa sering mengikuti kegiatan karena mahasiswa memiliki rasa pengetahuan yang baik, kesadaran partisipasi politik yaitu merupakan

kesadaran mahasiswa baik individu maupun kelompok untuk turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang politik yang ada di kampus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Abdila Sebe) Selaku mahasiswa PPKn semester III pada (Senin, 14 November 2022) mengatakan bahwa kesadaran partisipasi politik mahasiswa sebagai implementasi pendidikan politik yaitu mahasiswa yang aktif dalam kegiatan politik adalah mahasiswa yang memiliki rasa pengetahuan yang baik, mahasiswa juga bersikap seolah semua dapat dikendalikan, dengan mengikut serta aktif dalam kegiatan pemilihan ketua HMJ atau kegiatan lainnya. dilihat dari perbuatan mahasiswa yang sedang dilakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Meidjiada Kasibit) Selaku mahasiswa PPKn semester V pada (Jum'at, 11 November 2022) mengatakan bahwa kesadaran partisipasi politik mahasiswa sebagai implementasi pendidikan politik yaitu sikap dan tindakan mahasiswa dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan lainnya, kesadaran partisipasi politik yaitu mahasiswa yang berhak dan wajib dalam menentukan pilihannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran partisipasi politik mahasiswa sebagai bentuk implementasi pendidikan politik yaitu aktivitas yang dilakukan mahasiswa dalam lingkungan kampus, mahasiswa yang memiliki pengetahuan, dan kesadaran politik merupakan kesadaran mahasiswa baik individu maupun kelompok untuk turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan politik, kegiatan politik ini dapat berupa kampanye, kegiatan

memilih dalam pemilihan ketua HMJ dan lainnya, kesadaran politik dalam berpartisipasi dilihat dari perbuatan yang sedang dilakukan.

3. Bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa PPKn sebagai perwujudan warga Negara yang baik

Berdasarkan hasil wawancara dengan (M.Dani Buamona) selaku mahasiswa semester VII, mengatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa dilihat dari mahasiswa pada saat mengikuti kegiatan pemilihan mahasiswa melakukan dengan pemberian suara (atau voting) ini adalah alat untuk mengespresikan, mengumpulkan pilihan, atau calon dari pemilihan. Diskusi politik hal ini juga dapat bertukar pikiran tentang masalah-masalah yang ada kemudian dicarikan pemecahannya yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan public. Ada juga kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, beberapa bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan mahasiswa di kampus, bentuk partisipasi politik ini dapat diterapkan dimana pun serta dalam berbagai perilaku mahasiswa. Partisipasi dan perilaku politik mengacu pada norma dan nilai-nilai yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Ikbal Yasin) selaku mahasiswa semester VII, mengatakan bahwa bentuk partisipasi politik mahasiswa yaitu dengan melakukan pemberian suara pada saat pemilihan dan kampanye juga melakukan diskusi politik, bentuk partisipasi politik ini dapat membuat mahasiswa lebih yakin dengan jalannya yang dipilih dan ini dapat mencapai

tujuannya. Bentuk partisipasi politik mahasiswa sering dilakukan di kampus, dan mahasiswa juga membuat kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan politiknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (M.Rifaldi A,Djohra) selaku mahasiswa semester V, mengatakan bahwa bentuk partisipasi politik mahasiswa yaitu dengan melakukan pemberian suara pada saat pemilihan ketua HMJ, dan kampanye, mahasiswa juga melakukan sosialisasi, bentuk partisipasi politik ini kita mmelihat bahwa mahasiswa melakukan berbagai partisipasi politik untuk mencaapai tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Anisa Ali) selaku mahasiswa semester V, mengatakan bahwa bentuk partisipasi politik mahasiswa yaitu jika ada pemilihan ketua HMJ maka mahasiswa melakuakn dengan pemberian suara (voting), mahasiswa juga sering kita lihat membuat kelompok kepetingan hal ini agar untuk mahasiswa mencapai tujuannya, mahasiswa jga melakukan kampanye, dan mahasiswa juga melakukan komunikasi individual. Itu bentuk partisipasi politik mahasiswa untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Abdila Sebe) selaku mahasiswa semester III, mengatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa dalam kegiatan yang dilakukan dikampus mahasiswa dapat menjalankan aksi nya, dalam pemilihan ketua HMJ dengan menggunakan hak suara/pemberian suara(voting) mahasiswa juga melakukan kampanye, dan mahasiswa membentuk

dan bergabung kedalam kelompok kepentingan hal ini biasanya dilakukan dengan ikut membentuk organisasi HMJ.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Ferawati Irwan) selaku mahasiswa semester III, mengatakan bahwa mahasiswa sering melakukan aktivitas nya dikampus, bentuk partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan ketua HMJ mahasiswa melakukan dengan pemilihan suara, melakukan kampanye, membentuk kelompok kepentingan, dan mahasiswa juga melakukan sosialisasi, hal ini untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa sebagai upaya implementasi pendidikan politik mahasiswa dalam aktivitas yang dilakukan dan kegiatan yang diikuti itu termasuk politik, setiap ada kegiatan mahasiswa berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan. Dalam kegiatan pemilihan ketua HMJ mahasiswa sudah mulai melakukan kegiatan contacting atau komunikasi individual kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengajak dan menyalurkan aspirasi. Pemilihan ktua HMJ mahasiswa melakukan dengan pemberian suara(voting) yaitu pemungutan suara adalah alat untuk mengespresikan dan mengumpulkan pilihan atau calon dalam pemilihan. Mahasiswa juga melakukan kegiatan kampanye, bentuk kegiatan ini sangat malar dan efektif dalam menyampaikan aspirasi dalam sebuah pemilihan. Diskusi hal ini merupakan ajang tukar pikiran tentang masalah-masalah untuk kemudian di carikan pemecahannya yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan kampus. Tentu hal ini agar mencapai tujuannya.

B. Pembahasan

1. Pemahaman mahasiswa PPKn tentang partisipasi politik

Pemahaman mahasiswa PPKn tentang partisipasi politik yaitu peran serta atau partisipasi mahasiswa dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan dalam kamus, *public policy*. Secara konfesional kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan, menghadiri rapat umum, menjadi anggota atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan orang-orang yang berkepentingan dalam urusan politik.

Selama ini kegiatan partisipasi politik mahasiswa masih dipahami sebagai upaya mobilitas mahasiswa untuk kepentingan organisasi atau kampus. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya mahasiswa ikut serta dalam menentukan kebijakan kampus yaitu bagian dari kontrol mahasiswa terhadap kebijakan kampus.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakalah proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan.

Elly M.Setiadi & usman (2013:127) menjelaskan partisipasi politik amat urgen dalam konteks dinamika perpolitikan dalam suatu masyarakat. Melalui partisipasi politik yang dilakukan baik oleh setiap individu maupun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala yang menyangkut kebutuhan warga

masyarakat secara universal akan dapat diwujudkan. Keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok dianggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Yang paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada.

Partisipasi politik sebenarnya merupakan suatu konsep yang sangat populer dalam ilmu politik. Namun penggunaannya bermacam-macam sehingga menimbulkan konsep yang berbeda-beda. Sekalipun demikian sebagian besar bersepakat bahwa yang dimaksudkan dengan partisipasi politik adalah bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan politik. Tujuan dari kegiatan-kegiatan politik ini ialah untuk mempengaruhi kebijakan kampus.

Partisipasi politik merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam kehidupan politik pada suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Partisipasi politik bukan hanya sekedar memberikan hak suara untuk pemimpin mereka, tetapi lebih dari itu bahwa partisipasi politik warga negara yang aktif juga menunjukkan bahwa suatu negara tersebut telah layak disebut sebagai negara demokrasi

Budiarjo (2008:367) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*containing*) atau *lobbying* dengan pejabat

pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Mahasiswa dengan berbagai peran sosialnya dapat melakukan aktivitas-aktivitas sosial politik, aktivitas tersebut dapat dilihat dari fenomena pemerintahan mahasiswa tersebut sebagai wujud dari politik yang ada di kampus.

Terkait pemahaman politik sebagai konsep sentral perilaku politik, Surbakti (2010:187) menjelaskan pengetahuan politik melalui pendekatan psikologi sosial. Surbakti menjelaskan bahwa pendekatan psikologi sosial sama dengan penjelasan yang diberikan dengan model perilaku politik. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilihan atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Konkretnya, Partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa pengaruh oleh faktor-faktor yang lain. Selain itu, tingkah laku psikologis menerjemahkan bahwa dalam tingkah laku politik adalah individu (manusia) bersama kepentingan, tujuan, dan motivasi yang mengakibatkan proses belajar, pemahaman, kognisi, dan simbolis.

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis ini adalah terdapat pengaruh positif pengetahuan politik dan partisipasi politik mahasiswa PPKn pada pemilihan ketua hmk. Walaupun pengetahuan politik memiliki pengaruh yang positif terhadap pemahaman partisipasi politik, namun dengan adanya pemahaman mahasiswa dapat mengikuti dan menjalankan setiap kegiatan yang

ada dilingkungan kampus. Pemahaman partisipasi politik ini dipengaruhi oleh kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah(sistem politik).

2. Membangun Kesadaran partisipasi politik mahasiswa sebagai bentuk implementasi pendidikan politik

Membangun kesadaran partisipasi politik mahasiswa sebagai bentuk implementasi pendidikan politik adalah aktifitas kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam lingkungan kampus, membangun kesadaran partisipasi politik dilakukan dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, kegiatan diskusi politik dan kegiatan politik lainnya, kesadaran partisipasi politik mahasiswa yaitu keadaan seseorang secara penuh akan pengetahuan berbagai hal terkait proses partisipasi politik dalam kampus. Seseorang dianggap memiliki kesadaran dalam partisipasi politik apabila ia telah menyadari dan mengetahui hal-hal yang terkait dengan sistem politik dengan baik. Kesadaran partisipasi politik diartikan sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa.

Hal ini dapat diartikan bahwa membangun kesadaran partisipasi politik merupakan aktifitas yang terorganisir dan efektif yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipasi politik yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Lewat partisipasi politik membangun kesadaran partisipasi politik orang yang berusaha melakukan pembentukan pribadi yang demokratis, disamping usaha demokratisasi ada struktur kemahasiswaannya.

Menurut kartono (2009:78) membangun kesadaran partisipasi politik bahwa pendidikan politik upaya belajar dan latihan mensistematikan aktivitas sosial, dan membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama manusia disuatu wilayah negara.

Hal ini dapat diartikan dengan segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan program yang dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan melakukan aktifitas kegiatan sosialisas politik sesuai dengan keijakan.

Kesadaran politik dijadikan salah satu ukuran untuk melihat budaya politik suatu negara bagi Gabriel Almond dan Sidney verba. Dalam kesadaran partisipasi politik, pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap sistem politik berkaitan dengan keikut serta aktif seseorang dalam pemilihan. Kesadaran partisipasi politik yaitu mahasiswa selalu dituntut untuk memiliki kesadaran politik yang baik, dengan kesadaran politik yang baik maka mahasiswa memiliki kesadaran akan partisipasi dalam sebuah kehidupan politik. Selama ini kesadaran politik diukur melalu tingkat partisipasi politik berupa kegiatan pemilihan.

Surbakti (2010:184) kesadaran partisipasi politik adalah kesadaran setiap orang terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang lingkungan dan politik di lingkungan dia hidup. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diperoleh indicator yang dapat digunakan untuk mengukur indikator kesadaran politik sebagai berikut.

1. Pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik.

Pengetahuan politik secara sederhana dapat diartikan sebagai

pengetahuan seseorang dengan defines, tujuan, dan juga pengetahuan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik serta menerapkan apa yang ia ketahui tentang politik dalam kehidupan sehari-hari.

2. Minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Minat dan perhatian terhadap masyarakat dan politik dilingkungan dia hidup adalah sikap antusias terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat dalam politik serta mengikuti kegiatan politik yang terjadi dalam masyarakat tempat ia hidup.

Kesadaran politik sangat berhubungan erat dengan partisipasi politik mahasiswa. Ada dua bentuk partisipasi politik yang berkaitan dengan momen pemilihan ketua hmj, yaitu ikut serta dalam kampanye pemilu dan memberikan suara dalam pemilihan ketua hmj. Partisipasi politik tanpa kesadaran itu bisa saja terjadi, seperti pada kasus pemilih yang hanya sekedar menggunakan pilihannya, namun sebenarnya ia hanya asal memilih. Sebaliknya, partisipasi politik yang dilandasi kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan.

Wujud dari kesadaran politik salah satu bentuknya adalah partisipasi politik dalam pemilihan ketua hmj, partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihannya secara rasional. Kesadaran politik yang baik maka mahasiswa memiliki kesadaran akan posisinya

dalam sebuah tatanan kehidupan yang lebih lanjut memperkuat sistem demokrasi Negara tersebut.

3. Bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa PPKn sebagai perwujudan warga negara yang baik

Bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa bisa diartikan sebagai kegiatan atau sekelompok mahasiswa untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Hal ini umumnya dilakukan seseorang dalam posisinya sebagai mahasiswa, bukannya politikus ataupun pegawai negeri. Dan sifatnyapun sukarela.

Bentuk partisipasi politik mahasiswa sebagai perwujudan warga negara yang baik, wujud partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai bentuk dan intensitas keikutsertaan mahasiswa yang bertujuan untuk mendorong perubahan bangsa. Intensitas yang beragam ini dilakukan oleh warga Negara dari mulai tingkatan pasif hingga aktif.

Berdasarkan hak dan kewajiban warga Negara yang baik, partisipasi politik partisipasi politik aktif diharapkan dapat dilakukan mahasiswa Karena mencerminkan kesadaran dan kepercayaan politik secara penuh. Hal ini karena partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang memiliki kesadaran berdemokrasi dan bela Negara.

Warga negara menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau

aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau jalur-jalur lainnya seperti media massa, sosial media, dan sebagainya. Partisipasi politik juga dapat diikuti secara langsung guna memberikan aspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan, penilaian keputusan, sampai pelaksanaan keputusan, wujud partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai bentuk dan intensitas keikutsertaan mahasiswa untuk mendorong perubahan bangsa,

Partisipasi politik aktif bisa mencerminkan kesadaran dan kepercayaan politik secara penuh, mahasiswa dapat menampilkan perilaku politiknya secara tidak langsung melalui penyampaian pendapat secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau jalur-jalur lainnya seperti media massa, sosial media, dan sebagainya.

Bentuk partisipasi politik mahasiswa sebagai perwujudan warga negara yang baik, bentuk dan intensitas dari partisipasi politik sangat beragam. Partisipasi politik dapat dilakukan dari tingkatan pasif hingga yang aktif. Selain itu, partisipasi politik dapat diterapkan dimana pun serta dalam berbagai perilaku mahasiswa. Partisipasi dan perilaku politik tetap harus mengacu norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Bentuk partisipasi mahasiswa dilingkungan kampus

1. Mengikuti kegiatan keorganisasian: organisasi mahasiswa yang dibentuk di kampus biasanya ditujukan untuk mengatur dan menjalankan kegiatan diluar akademik mahasiswa.

2. Mengikuti pemilihan umum ketua HMJ: pemilihan ketua umum HMJ dilaksanakan dengan pemilihan langsung, tidak dipilih oleh dosen, tidak hanya sesi pemilihan saja, akan tetapi calon ketua himpunan mahasiswa jurusa juga biasa nya mengikuti serangkaian kegiatan tersebut antara lain pencalonan, kampanye, penyampaian visi dan misi, dan pemilihan langsung. Sistem ini sangat menjunjung tinggi nilai demokrstaisme.
3. Membuat anggaran dasar atau anggarana rumah tangga organisasi yang ada dikampus : semua organisasi menjalankan program kerja pasti akan membutuhkan anggaran. Oleh Karena itu, setiap organisasi juga perlu membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk mebiayai kegiatan
4. Tidak golput dalam pemilihan pengurus jurusan: pemilihan pengurus kelas seperti ketua hmj, sekertaris dan bendahara biasanya dilaksanakan melalui voting, mahasiswa diharapkan diharapkan bisa menggunakann hak pilihnya agar keputusan mufakat bisa dicapai.
5. Aktif menyuarakan aspirasi mahasiswa
6. Interaksi yang demokratis antara mahasiswa, dosen dan ketua prodi: hal ini agar semuanya harus menyematkan paham demokrasi. Denga paham tersebut, semua pihak akan merasa bahwa semuanya memiliki kesempatan yang sama dalam berpendapat, da dapat menghargai pendapat orang lain.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa di lihat secara langsung diantaranya melalui:

- 1) Pemilihan ketua umum HMJ
- 2) Melakukan kampanye
- 3) Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun
- 4) Melakukan diskusi politik
- 5) Aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik lainnya.

Sebagai perwujudan warga negara yang baik, mahasiswa memiliki hak dan kewajiban dalam lingkungan kampus.

1) Hak mahasiswa

Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan seni atas dasar norma susila dan tatakrma yang berlaku dalam lingkungan akademik
- b. Memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat bakat, kegemaran, dan kemampuan serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi.
- c. Menggunakann fasilitas institute dalam rangka pengembangan minat, bakat, penalaran , dan kesejahteraan untuk kelancaran proses belajar melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan melalui prosedur yang ada.
- d. Mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab (dosen wali, dosen pembimbing tugas akhir).

- e. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di institute dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mendapat bimbingan dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan
- g. Mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh

2) **Kewajiban mahasiswa**

- a. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Fkip.
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan institute
- c. Menjaga kewibawaan dan nama baik institute serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- d. Menghargai harkat dan nilai-nilai yang terdapat dalam ruang lingkup seni, ilmu pengetahuan , dan teknologi .
- e. Ikut serta menanggung biaya pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan (kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- f. Mengikuti perkuliahan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- g. Cepat menyelesaikan studinya dengan lebih awal dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- h. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan panduan SNAM (Sistem Nilai Aktivitas Mahasiswa)

- i. Mematuhi dan menjaga ketertiban kampus sesuai dengan panduan kode etik mahasiswa dan pedoman penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa

3) Larangan bagi mahasiswa

- a. Melakukan kegiatan politik praktis dilingkungan kampus
- b. Membuat kegiatan dan perbuatan yang menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras)
- c. Mengikuti program perkuliahan dan program kemahasiswaan tanpa memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa aktif
- d. Menggunakan fasilitas lembaga tanpa izin pejabat yang terkait.
- e. Membuat pernyataan atau tindakan yang mengatas namakan lembaga dan organisasi kemahasiswaan tanpa melalui prosedur dan aturan yang berlaku
- f. Bertingkah laku yang dapat merusak citra almamater, seperti sikap “premanisme”
- g. Memakai dan mengedarkan narkoba
- h. Memakai minuman keras dan mengedarkan minuman keras di kampus
- i. Melakukan kecurangan akademik, seperti plagiat, tulisan ilmiah, karya seni, serta pemalsuan surat-surat penting dan memalsukan nilai

4) Sanksi

- a. Apabila mahasiswa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan dikenai sanksi akademik dan sanksi non akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai Membangun Kesadaran Partisipasi Politik Mahasiswa Sebagai Upaya Implementasi Pendidikan Politik, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman mahasiswa PPKn tentang partisipasi politik, selama ini mahasiswa telah melakukan aktivitas dan mengikuti kegiatan baik itu kegiatan keikutserta dalam pemilihan ketua HMJ maupun kampanye dan mahasiswa juga sering berdiskusi. Dan pemahaman mahasiswa tentang partisipasi politik dapat dilihat dari aktivitas dan kegiatan yang sering dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus.
2. Membangun kesadaran partisipasi politik mahasiswa sebagai bentuk implementasi pendidikan politik, mahasiswa perlu melakukan aktivitas, kesadaran partisipasi politik dikalangan mahasiswa merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran partisipasi politik mahasiswa, hal ini dapat diartikan bahwa membangun membangun kesadaran partisipasi politik merupakan aktivitas yang terorganisir dan efektif yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipasi politik yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Lewat partisipasi politik membangun kesadaran partisipasi politik, orang yang berusaha

melakukan pembentukan pribadi yang demokratis, disamping usaha demokratis ada struktur kemahasiswaannya.

- b. 3). Bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa PPKn sebagai pewujudan warga Negara yang baik, dapat dilihat secara langsung a).Pemilihan ketua umum HMJ b) Melakukan kampanye c) Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun d) Melakukan diskusi politik e) Aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik lainnya. Sebagai perwujudan warga negara yang baik, mahasiswa memiliki hak dan kewajiban dalam lingkungan kampus. 1). Hak mahasiswa 2) Kewajiban mahasiswa 3) larangan bagi mahasiswa 4) sanksi : Apabila mahasiswa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan dikenai sanksi akademik dan sanksi non akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran dari peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Berbagai agenda yang berkaitan dengan kegiatan politik yang diselenggarakan oleh program studi PPKn harus terus dilakukan untuk meningkat kesadaran dan pengetahuan mahasiswa.
2. Sebagai upaya memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya Himpunan Mahasiswa Civis Hukum (HIMACH) dalam peningkatan partisipasi politik.
3. Perlu adanya penguatan terhadap organisasi yang berada dilingkungan kampus, khususnya Himpunan Mahasiswa Civis Hukum (HIMACH)

yang secara langsung berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam partisipasi politik.

4. Intensitas dalam melakukan kegiatan partisipasi politik mahasiswa, khususnya Himpunan Mahasiswa Civis Hukum (HIMACH) lebih sering dilakukan agar hasilnya lebih maksimal dalam peningkatan pengetahuan terutama pemahaman-pemahaman dalam berpolitik dan sebagai upaya juga untuk meningkatkan partisipasi politik mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab Sholichin, 2004. *"Analisis Kebijkasanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara"*. Jakarta: Bumi Aksara
- Alfian, Dkk (2015) *"Masa Depan Kehidupan Politik Masyarakat Indonesia"*, Jakarta;AIPI
- Almond Gabriel, (2017) *"Comparativ politicis today a world view. Boston Trronto"* : Little Brown and Company
- Bogdan, & Biklen (2015) *"Qualitative Research For Education"*. Boston: Allin Maret
- Branson Margaret S. (1998) *"Belajar Civic Education" dari Amerika, (Terjemahan Syarifudin dkk)*. Yogyakarta:LKIS
- Budiardjo (2014: 370). *"Dasar-dasar Ilmu Politik"*. Jakrta : Gramedia Pustaka
- Budimansyah (2009) *"Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan"*. Bandung : Genesindo
- David Easton & dkk. (AlMuhctar), 2009;39) *"The Political System"*. New York
- Hasibuan (2012:193) *"Menejemen SDM"* . Edisi Refisi, Cetakan ke tiga belas, Jakrta : Bumi Aksara
- Herbert McClosky (1988) *"Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisma dan Demokrasi"*. Yogyakarta Gadjah Mada Universitas Press
- Hungtington dkk, *"Partisipasi Politik di Negara Berkembang"*. Jakrta : Rineka Cipta
- Kantaprawira, Rusadi, *"Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar"*, Bandung : Sinar Baru
- Kartono K. (2015) *"Pendidikan Politik"*. Bandung Mandar Maju
- Maran, Rafael, (2001) *"Pengantar Sosiologi Politik"*, Jakarta: Rineka Cipta
- Margono, Slamet. (2005). *"Metodologi penelitian pendidikan"*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Michael Rush & Philip Althof (2010:147) *"Pengantar Sosiologi Politik"*, Jakarta ;. Raja Grafindo Persada

- Milbart & goel (2011) "*Political Participation*", Chicago : Rand McNally Cliffs.
- Mulyana, "(2015:36) "*Metedologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunnikasi dan Ilmu Sosila Lainnya*". Bandung:..Remaja Rosdakarya,2015
- Pactrik, Jhon. J (1999). "*education for constructive engagement of Citizen in Democratic Civil Society and Government,*" dalam Charles F. Bahmueller dan John J. Patrick, *Principles and Practices pf Education for Democratic Citizenship: International Perspectives and Project* , Bloomington, IN: *ERIC Clearinghous for social Studies/Social Scene Education and the ERIC Adjunct Clearinghous for International Civic Education in association with Civitas.*,pp.41-60
- Priambodo, A. 2000. "*Sikap Politik, Pengaruh kelompok, dan Partisipasi Politik di Kalangan Mahasiswa: Studi deskriptif pada mahasiswa Universitas Indonesia*". Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.
- Rush dan althoff (2010 :22). *Pengantar Sosiologi Politik*", Jakarta ;. Raja Grafindo Persada
- Sanapiah (1982) "*Metodologi Penelitian pendidikan*" .Surabaya :Usaha Nasional
- Soekanto B. Kutsneky 2008 "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakrta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono, (2017) "*Metode Penelitian Kualitatif*" Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan, (1992 :117) "*Memahami Ilmu Politik*". Jakarta : .Gramedia
- Widiasranna Utama UPI. (2007). "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Bandung*" : UPI
- Widjaya A (1984:46). "*Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*". Jakrta : Era Swasta
- Winarno, 2012, "*Pengaruh Lingkungan Belajar dan Motivasi Berprestasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Kompetensi Keahlian Tehnik Otomatis Industri SMK Yogyakarta*". Yogyakarta Jurnal. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Yogyakarta

Lampiran 1

Gambar Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kampus 1 Universitas Khairun Ternate Jl. Bandara Babullah. Kampus 1 Universitas Khairun Ternate Terdiri dari 10 Program Studi diantaranya adalah Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, PPKn, Geografi, PGSD, PAUD, Biologi, Fisika, Kimia, dan Matematika. Kampus 1 merupakan kampus pertama yang dimiliki oleh Universitas Khairun Sejak didirikannya Universitas ini, yang menjadi kampus fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP).

Penelitian ini dilakukan tepatnya pada program Pendidikan Kewarganegaraan yang dibangun pada periode kepemimpinan Rektor Jusuf Abdurahman tahun 1983-1998 di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara. Prodi PPKn Universitas Khairun merupakan kelompok Prodi SOSHUM untuk Program Sarjana (S1).

Lampiran 2

Struktur Kepemimpinan, Visi Misi, dan Tujuan Program Studi PPKn Unkhair

Adapun struktur kepemimpinan program studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai berikut:

Koordinator Program Studi : Dr. Wahyudin Noe, S.Pd, M.Pd

Tata Usaha : Zakia Abdullah, S.Pd

Dosen Tetap : 1. Dr.Syahril Muhammad, M.Hum
 2. Dr. Irwan Djumat, S.Ag., M.Pd
 3. Dr. Rustam Hasyim, S.Pd., M.Hum
 4. Dr. Irwan Abbas, S.S., M.Hum
 5. Dr. Mohtar Kamisi, S.Pd., M.Si
 6. Dr. Muhtar Yusuf, M.Si
 7. Jainudin Abdullah, S.Pd., M.Pd
 8. Rusdi Hasan. S.H., M.H
 9. Muhammad Arif Wicaksono, S.IP., M.I
 10. Muhammad Ramsliyanto, S.Pd., MH
 11. Irham Wibowo, SH., MH
 12. Misrina, S.IP., MA
 13. Hasmawati, S.Ag., M.Pd
 14. Nani I Rajaloea, S.Pd., M.Pd

15. Sitirahia Hi. Umar, S.Ag., M.A

16. Oktosiyanti MT. Abd, S,Pd., M.Pd

Adapun Visi dan Misi Program Studi Unkhair Yaitu:

Visi : menjadikan Program Studi yang unggul dan menghasilkan Lulusan yang bermoral kompeten dalam bidang pendidikan dan penelitian yang berbasis kemajemukan dan kemaritiman.

Misi : 1. menyelenggarakan Pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang kajian moral. Hukum, politik sejarah dan sosial budaya.

2.. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang mengembangkan inovasi dan model pembelajaran PPKn sekaligus kompeten dalam bidang ilmu pendidikan kewarganegaraan

1. Membekali kelulusan dengan kemampuan untuk terus meningkatkan kualitas akademik yang selaras dengan perkembangan IPTEK serta kemajemukan masyarakat yang berkaitan nilai dan moral.

2. Mengembangkan kerjasama akademik dengan institusi-institusi dan pusat-pusat kajian sesuai dengan tuntutan peningkatan mutu wawasan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Tujuan : 1. menghasilkan lulusan program studi pendidikan kewarganegaraan yang memiliki wawasan keilmuan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan yang berkarakter dan professional

2. menghasilkan sarjana pendidikan kewarganegaraan yang memiliki kompetensi pedagogic, professional, kepribadian, dan sehingga mampu berkompetisi.
3. menghasilkan sarjana pendidikan kewarganegaraan yang terampil mengelola pembelajaran yang inovatif.
4. menghasilkan sarjana pendidikan kewarganegaraan yang memiliki kepekaan terhadap warganegara secara nasional yang berbasil kearifan local

Lampiran 3

Kisi-kisi Wawancara

No	Pertanyaan penelitian	Aspek yang dinilai	Sumber data	Alat pengumpulan data
1	Bagaimana pemahaman mahasiswa PPKn dalam partisipasi politik ?	a. Pandangan mahasiswa dalam paertisipasi politik b. Pelaksanaan partisipasi politik mahasiswa c. Keterlibatan mahasiswa dalam partisipasi politik	Mahasiswa	a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi
2	Bagaimana membangun kesadaran partisipasi politik mahasiswa sebagai upaya implementasi pendidikan	a. Kesadaran partisipasi politik mahasiswa b. Tanggung jawab politik mahasiswa	Mahasiswa	a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi

	politik ?			
3	Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa PPKn sebagai upaya implementasi pendidikan politik ?	a. Bentuk-bentuk partisipasi politik mahasiswa PPKn b. Sikap berpolitik mahasiswa	Mahasiswa	a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi

Lampiran 4

Pedoman Wawancara

(Mahasiswa)

Data Responden :

Nama :

Semester

Alamat :

Hari/Tanggal :

	Pertanyaan Penelitian	Informasi yang diperoleh
1	Bagaimana pandangan anda tentang partisipasi politik mahasiswa?	
2	Apa yang anda ketahui tentang partisipasi politik ?	
3	Menurut anda, apakah ada faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa ?	
4	Menurut anda, apa faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa	

5	Menurut anda, bagaimana proses pelaksanaan partisipasi politik mahasiswa ?	
6	Menurut anda, apa tujuan pelaksanaan dari partisipasi politik mahasiswa ?	
7	Menurut anda, bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam partisipasi politik ?	
8	Apa sajakah upaya yang anda lakukan agar terlibat kedalam partisipasi politik ?	
9	Menurut anda, bagaimana kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?	
10	Menurut anda, bagaimana cara membangun kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?	
11	Menurut anda, bagaimana tanggung jawab mahasiswa dalam partisipasi politik ?	
12	Menurut anda, tanggung jawab seperti apa yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa ?	
13	Menurut anda, apa saja bentuk partisipasi politik mahasiswa di kampus ?	

14	Mahasiswa harus menunjukan sikap politiknya yang netral tetapi tetap mewarnai perkembangan politik yang memberikan suara kebenaran dan menjadi problem solver serta control sosio-politik yang ada. Menurut anda, bagaimana sikap mahasiswa dalam berpolitik ?	
15	Menurut anda, apa contoh sikap partisipasi politik mahasiswa di lingkungan kampus ?	

Lampiran 5 Dokumentasi



Wawancara Mahasiswa Semester I



Wawancara mahasiswa semester I



Wawancara Mahasiswa Semester III



Wawancara Mahasiswa Semes



Wawancara Mahasiswa Semester V



Wawancara mahasiswa semester VII



Wawancara mahasiswa semester VII

Filed Notes Wawancara

Nama : Rahmadani Hasanudi

Semester : I

Alamat : Akehuda

Hari/tanggal : Kamis, 10 November 2022

Peneliti : Assalamu'alaikum. Wr.Wb

RH : Waalaikumsalam. Wr.Wb

Peneliti : Bagaimana pandangan anda tentang partisipasi politik mahasiswa ?

RH : Cukup baik, saya sering melihat mahasiswa melakukan peran dan mengikuti kegiatan partisipasi politik serta turut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik kampus

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang partisipasi politik ?

RH : Partisipasi politik adalah salah satu kegiatan yang melibatkan diri dalam menentukan kegiatan HMJ maupun pemilihan presiden BEM

Peneliti : Menurut anda, apakah ada faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik ?

RH : Adanya beda pendapat sehingga terhambatnya suatu komunitas

Peneliti : Menurut anda, apa faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik ?

RH : Yaitu adanya persatuan, kerja sama, saling mendukung satu dan lainnya

Peneliti : Menurut anda, bagaimana proses pelaksanaan partisipasi politik mahasiswa?

RH : Adanya kebersamaan dan kekompakan sehingga pelaksanaan itu berjalan dengan semestinya

Peneliti : Menurut anda, apa tujuan pelaksanaan dari partisipasi politik mahasiswa ?

- RH : Partisipasi yang diambil dari mahasiswa yang tujuan yaitu dengan mahasiswa memiliki kesadaran agar mensukseskan suatu kegiatan tersebut
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam partisipasi politik ?
- RH : Keterlibatan mahasiswa yaitu dengan ikut terampil dalam kegiatan dan mampu memberikan saran terkait dengan partisipasi politik
- Peneliti : Apa sajakah upaya yang anda lakukan agar terlibat dalam partisipasi politik ?
- RH : Upaya yang saya lakukan agar terlibat yaitu dengan menampilkan skill dan mampu memberikan pendapat
- Peneliti : Menurut anda, Bagaimana kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?
- RH : Dengan keinginan tahunan partisipasi politik maka kita akan sadar bahwa hal ini patut kita sadari namun ada mahasiswa yang tidak ada kesadaran mengenai partisipasi politik
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana cara membangun kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?
- RH : Dengan mengikuti kajian dan kegiatan politik
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana tanggung jawab mahasiswa dalam partisipasi politik ?
- RH : Tanggung jawab mahasiswa yaitu mahasiswa harus menjaga sikap dan sudut pandang sendiri terhadap partisipasi politik
- Peneliti : Menurut anda, tanggung jawab seperti apa yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik ?
- RH : Mematuhi perintah menjaga, menjaga keamanan, mengadopsi sikap selama kegiatan partisipasi politik
- Peneliti : Menurut anda, apa saja bentuk partisipasi politik mahasiswa di kampus ?
- RH : Bentuk partisipasi politik yaitu menaati peraturan, menerima dan melaksanakan keputusan yang ada

- Peneliti : Mahasiswa harus menunjukan sikap politiknya yang netral tetapi tetap mewarnai perkembangan politik yang memberikan suara kebenaran dan menjadi problem solver serta control sosio-politik yang ada. Menurut anda, bagaimana sikap mahasiswa dalam berpolitik ?
- RH : Sering aktif dan melakukan kegiatan-kegiatan didalam dunia kampus.
- Peneliti : Menurut anda, apa contoh sikap partisipasi politik mahasiswa dilingkungan kampus ?
- RH : Sering melakukan aksi dan kegiatan lainnya.

Filed Notes Wawancara

Nama : Aidia Umasugi

Semester : I

Alamat : Akehuda

Hari/tanggal : Kamis, 10 November 2022

Peneliti : Assalamu'alaikum. Wr.Wb

AU : Waalaikumsalam. Wr.Wb

Peneliti : Bagaimana pandangan anda tentang partisipasi politik mahasiswa ?

AU : Baik, saya melihat mahasiswa yang yang aktif dalam kegiatan partisipasi politik namun hanya ada sebagian mahasiswa yang tidak terlalu memperdulikan dengan kegiatan partisipasi politik

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang partisipasi politik ?

AU : Sekelompok orang untuk turut aktif dalam kehidupan politik

Peneliti : Menurut anda, apakah ada faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa ?

AU : Tidak ada

Peneliti : Menurut anda, apa faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik ?

AU : Adanya persatuan dan kerja sama dalam meningkatkan partisipasi politik

Peneliti : Menurut anda, bagaimana proses pelaksanaan partisipasi politik mahasiswa?

AU : Proses pelaksanaan yaitu baik adanya kekompakan dalam melaksanakan partisipasi politik

Peneliti : Menurut anda, apa tujuan pelaksanaan dari partisipasi politik mahasiswa ?

- AU : Untuk bagaimana kita melaksanakan dan melakukan sesuatu yang aktif dalam kampus secara bersama dalam mensukseskan kegiatan partisipasi politik
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam partisipasi politik ?
- AU : Baik dengan mengikuti kegiatan dan memberikan saran terkait dengan partisipasi politik.
- Peneliti : Apa sajakah upaya yang anda lakukan agar terlibat kedalam partisipasi politik ?
- AU : Belajar dan aktif
- Peneliti : Menurut anda, Bagaimana kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?
- AU : Kesadaran partisipasi politik masih kurang, melihat yang lain masih sering acuh tak acuh dengan kegiatan partisipasi politik di kampus
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana cara membangun kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?
- AU : Belajar, selalu aktif dan sering mengikuti kegiatan politik
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana tanggung jawab mahasiswa dalam partisipasi politik ?
- AU : Mahasiswa harus sigap dalam bersikap dan ikut berperan dalam partisipasi politik
- Peneliti : Menurut anda, tanggung jawab seperti apa yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik ?
- AU : Mematuhi aturan dan ikut peran dalam kegiatan partisipasi politik,
- Peneliti : Menurut anda, apa saja bentuk partisipasi politik mahasiswa di kampus ?
- AU : Bentuk partisipasi politik yaitu menaati peraturan, menerima dan melaksanakan keputusan yang ada
- Peneliti : Mahasiswa harus menunjukkan sikap politiknya yang netral tetapi tetap mewarnai perkembangan politik yang memberikan suara

kebenaran dan menjadi problem solver serta control sosio-politik yang ada. Menurut anda, bagaimana sikap mahasiswa dalam berpolitik ?

AU : Mahasiswa harus mampu melakukan tanggung jawab sebagai pusat intelektual untuk mengembangkan politik yang ada.

Peneliti : Menurut anda, apa contoh sikap partisipasi politik mahasiswa dilingkungan kampus ?

AU : Saling mengingatkan, dan saling bekerja sama

Filed Notes Wawancara

Nama : Abdila Sebe

Semester : III

Alamat : Akehuda

Hari/tanggal : Jumat, 11 November 2022

Peneliti : Assalamu'alaikum. Wr.Wb

AS : Waalaikumsalam. Wr.Wb

Peneliti : Bagaimana pandangan anda tentang partisipasi politik mahasiswa ?

AS : Menurut saya mahasiswa harus mempunyai kesedaran partisipasi politik yang ada dilingkungan kampus FKIP.

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang partisipasi politik ?

AS : Partisipasi politik itu keikut serta mahasiswa dalam kegiatan pemilihan ketua umu jurusan

Peneliti : Menurut anda, apakah ada faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik ?

AS : Pengahmbat yaitu kurang kesadaran dan tidak mengetahui politik

Peneliti : Menurut anda, apa faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik ?

AS : Yaitu kerja sama , dan saling mendukung

Peneliti : Menurut anda, bagaimana proses pelaksanaan partisipasi politik mahasiswa?

AS : Memberikan hak suara

Peneliti : Menurut anda, apa tujuan pelaksanaan dari partisipasi politik mahasiswa ?

AS : Untuk mensukses kan kegiatan tersebut .

Peneliti : Menurut anda, bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam partisipasi politik ?

- AS : Keterlibatan mahasiswa semisal nya mencalonkan diri sebagai ketua Himapro maupun BEM
- Peneliti : Apa sajakah upaya yang anda lakukan agar terlibat kedalam partisipasi politik ?
- AS : Melaksanakan kegiatan politik
- Peneliti : Menurut anda, Bagaimana kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?
- AS : Sosialisasi politik prtaktis yang ada dilembaga mahasiswa.
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana cara membangun kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?
- AS : Sering ikut kegiatan-kegiatan politik, ikut kajian dan sering baca buku terakut politik.
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana tanggung jawab mahasiswa dalam partisipasi politik ?
- AS : Wajib sebagai mahasiswa menaati aturan yang berlaku.
- Peneliti : Menurut anda, tanggung jawab seperti apa yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik ?
- AS : Melaksanakan apa yang dilaksanakan dalam kegiatan partisipasi politik, dan menjaga sikap.
- Peneliti : Menurut anda, apa saja bentuk partisipasi politik mahasiswa di kampus ?
- AS : Bentuk partisipasi politik yaitu menaati peraturan, menerima dan melaksanakan keputusan yang ada
- Peneliti : Mahasiswa harus menunjukkan sikap politiknya yang netral tetapi tetap mewarnai perkembangan politik yang memberikan suara kebenaran dan menjadi problem solver serta control sosio-politik yang ada. Menurut anda, bagaimana sikap mahasiswa dalam berpolitik ?
- AS : Dalam skema politik mahasiswa harus mampu melakukan tanggung jawab sebagai pusat intelektual untuk mengembangkan politik yang ada.

Peneliti : Menurut anda, apa contoh sikap partisipasi politik mahasiswa dilingkungan kampus ?

AS : Pertama aksi, organisasi baik itu internal maupun eksternal.

Filed Notes Wawancara

Nama	: Ferawati Irwan
Semester	: III
Alamat	: Jati
Hari/tanggal	: Jumat, 11 November 2022
Peneliti	: Assalamu'alaikum. Wr.Wb
FI	: Waalaikumsalam. Wr.Wb
Peneliti	: Bagaimana pandangan anda tentang partisipasi politik mahasiswa ?
FI	: Partisipasi mahasiswa dalam politik masih umum.
Peneliti	: Apa yang anda ketahui tentang partisipasi politik ?
FI	: Partisipasi politik kegiatan sekelompok orang yang turut serta aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung.
Peneliti	: Menurut anda, apakah ada faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik ?
FI	: Tidak memiliki kompetensi, walaupun seorang mahasiswa tidak memiliki kompetensi atau kecerdasan maka dia akan keliru dalam partisipasi politik.
Peneliti	: Menurut anda, apa faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik ?
FI	: Faktor pendukung internal yang terdiri dari kesadaran dan kepercayaan politik serta faktor eksternal yang terdiri dari peluang resmi, sumber daya social, sosialisasi.
Peneliti	: Menurut anda, bagaimana proses pelaksanaan partisipasi politik mahasiswa?
FI	: Dalam pembangunan kampus, partisipasi politik dalam proses musyawarah.

- Peneliti : Menurut anda, apa tujuan pelaksanaan dari partisipasi politik mahasiswa ?
- FI : Agar politik mahasiswa dapat nerjalan dengan baik aman sesuai yang dijalankan
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam partisipasi politik ?
- FI : Fungsi mahasiswa keterlibatan dalam partisipasi adalah untuk mengontrol hala politik agar kegiatan politik dapat berjalan dengan baik.
- Peneliti : Apa sajakah upaya yang anda lakukan agar terlibat kedalam partisipasi politik ?
- FI : Upaya yang saya lakukan mengkampanyekan serta bekerja untuk mengembangkan orang yang benar-benar menurut saya pantas.
- Peneliti : Menurut anda, Bagaimana kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?
- FI : Kesadaran partisipasi politik mahasiswa adalah menjalankan politik yang ada dan benar.
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana cara membangun kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?
- FI : Caranya adalah melaksanakan sosialisasi dan juga menyampaikan bahkan berpolitik jangan menggunakann uang atau mani politik.
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana tanggung jawab mahasiswa dalam partisipasi politik ?
- FI : Tanggung jawab mahasiswa adalah mengontrol segala hal dalam berpolitik dan juga dapat melihat dan memilih kepemimpinan yang baik.
- Peneliti : Menurut anda, tanggung jawab seperti apa yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik ?
- FI : Politik yang netral tetapi tetap mewarnai perkembangan politik yang memberikan suara kebenaran.

- Peneliti : Menurut anda, apa saja bentuk partisipasi politik mahasiswa di kampus ?
- FI : Bentuk partisipasi politik mahasiswa di kampus adalah melaksanakan pemilihan misalnya pemilihan BEM atau HMJ
- Peneliti : Mahasiswa harus menunjukkan sikap politiknya yang netral tetapi tetap mewarnai perkembangan politik yang memberikan suara kebenaran dan menjadi problem solver serta control sosio-politik yang ada. Menurut anda, bagaimana sikap mahasiswa dalam berpolitik ?
- FI : Sikap mahasiswa untuk mencapai semua mengikuti serta kegiatan didalam dunia kampus.
- Peneliti : Menurut anda, apa contoh sikap partisipasi politik mahasiswa di lingkungan kampus ?
- FI : Organisasi internal atau eksternal

Filed Notes Wawancara

Nama : Karti Sapsuha

Semester : V

Alamat : Akehuda

Hari/tanggal : Kamis, 10 November 2022

Peneliti : Assalamu'alaikum. Wr.Wb

KS : Waalaikumsalam. Wr.Wb

Peneliti : Bagaimana pandangan anda tentang partisipasi politik mahasiswa ?

KS : Partisipasi dikalangan mahasiswa cukup baik.

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang partisipasi politik ?

KS : Keikut serta dalam pemilihan ketua himapro secara aman.

Peneliti : Menurut anda, apakah ada faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik ?

KS : Tidak ada pendapat.

Peneliti : Menurut anda, apa faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik ?

KS : Memiliki strategi pemilih atau politik yang evektif aktif.

Peneliti : Menurut anda, bagaimana proses pelaksanaan partisipasi politik mahasiswa?

KS : Partisipasi dalam melakukan pendekatan mahasiswa sangat erat dalam organisasi.

Peneliti : Menurut anda, apa tujuan pelaksanaan dari partisipasi politik mahasiswa ?

KS : Tujuan untuk melancarkann suatu kegiatan dalam organisasi.

Peneliti : Menurut anda, bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam partisipasi politik ?

- KS : Yaitu mahasiswa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh organisas.
- Peneliti : Apa sajakah upaya yang anda lakukan agar terlibat kedalam partisipasi politik ?
- KS : Mengikuti setiap pemilihan yang ada.
- Peneliti : Menurut anda, Bagaimana kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?
- KS : Mahasiswa taat kepada aturan yang dapat diberikan.
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana cara membangun kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?
- KS : Yaitu dengan cara menghargai dalam suatu organisasi.
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana tanggung jawab mahasiswa dalam partisipasi politik ?
- KS : Menurut saya, saling mendukung satu sama lain dalam organisasi tersebut.
- Peneliti : Menurut anda, tanggung jawab seperti apa yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik ?
- KS : Sebagai pimpinan harus memiliki sikap yang tegas.
- Peneliti : Menurut anda, apa saja bentuk partisipasi politik mahasiswa di kampus ?
- KS : Salah satu bentuk dari kegiatan yaitu mahasiswa membantu dosen untuk meraih akreditasi prodi.
- Peneliti : Mahasiswa harus menunjukkan sikap politiknya yang netral tetapi tetap mewarnai perkembangan politik yang memberikan suara kebenaran dan menjadi problem solver serta control sosio-politik yang ada. Menurut anda, bagaimana sikap mahasiswa dalam berpolitik ?
- KS : Mahasiswa dapat melakukan pendekatan bersama dosen maupun mahasiswa.
- Peneliti : Menurut anda, apa contoh sikap partisipasi politik mahasiswa di lingkungan kampus ?

KS : Harus taat terhadap aturan-aturan yang diberikan oleh kampus.

Filed Notes Wawancara

Nama : M.Rifaldi A. Djohra

Semester : V

Alamat : Kulaba

Hari/tanggal : Kamis, 10 November 2022

Peneliti : Assalamu'alaikum. Wr.Wb

MR : Waalaikumsalam. Wr.Wb

Peneliti : Bagaimana pandangan anda tentang partisipasi politik mahasiswa ?

MR : Partisipasi politik mahasiswa cukup aktif, namun masih perlu bimbingan.

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang partisipasi politik ?

MR : Partisipasi politik adalah kegiatan politik yang diikuti oleh masyarakat/mahasiswa yang berkontribusi untuk kepentingan bersama.

Peneliti : Menurut anda, apakah ada faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik ?

MR : Tentu saja ada, salah satu nya beda pendapat.

Peneliti : Menurut anda, apa faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik ?

MR : Mahasiswa melakukan sosialisasi politik sehat, di berikan pembekalan ilmu politik.

Peneliti : Menurut anda, bagaimana proses pelaksanaan partisipasi politik mahasiswa?

MR : Partisipasi politik mahasiswa dikampus, 1 pemilihan ketua himapro maupun Pres BEM. 2 demokrasi/aspirasi.

Peneliti : Menurut anda, apa tujuan pelaksanaan dari partisipasi politik mahasiswa ?

- MR : Kesejahteraan bersama, meluruskan pemerintahan, ,emjernikan politik.
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam partisipasi politik ?
- MR : Menurut saya mahasiswa terlibat ada, namun tidak begitu paham dengan tujuan.
- Peneliti : Apa sajakah upaya yang anda lakukan agar terlibat kedalam partisipasi politik ?
- MR : Pemungutan suara, sosialisasi politik yang saya ikuti.
- Peneliti : Menurut anda, Bagaimana kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?
- MR : Kesadarannya ada dan cukup baik.
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana cara membangun kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?
- MR : Dengan cara, membangun lomba-lomba debat tentang politik.
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana tanggung jawab mahasiswa dalam partisipasi politik ?
- MR : Tanggung jawab nya masih kurang karena mereka kadang anarkis dengan bahasanya.
- Peneliti : Menurut anda, tanggung jawab seperti apa yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik ?
- MR : Jangan golput, ikuti sosialisasi jika ada.
- Peneliti : Menurut anda, apa saja bentuk partisipasi politik mahasiswa di kampus ?
- MR : Pemilu, ikuti sosialisasi, kampanye dll.
- Peneliti : Mahasiswa harus menunjukkan sikap politiknya yang netral tetapi tetap mewarnai perkembangan politik yang memberikan suara kebenaran dan menjadi problem solver serta control sosio-politik yang ada. Menurut anda, bagaimana sikap mahasiswa dalam berpolitik ?

- MR : Sikapnya haruslah berpihak pada tujuan dan program yang menguntungkan masyarakat.
- Peneliti : Menurut anda, apa contoh sikap partisipasi politik mahasiswa dilingkungan kampus ?
- MR : Pemilihan ketua himapro maupun Pres BEM, Sosialisasi, MBKM

Filed Notes Wawancara

- Nama : Ikbal Yasin
- Semester : VII
- Alamat : Kel. Jati
- Hari/tanggal : Kamis, 10 November 2022
-
- Peneliti : Assalamu'alaikum. Wr.Wb
- IY : Waalaikumsalam. Wr.Wb
- Peneliti : Bagaimana pandangan anda tentang partisipasi politik mahasiswa ?
- IY : Sebagai mahasiswa tentu kata politik sudah tidak asing lagi, partisipasi tersebut, ditandai dengan adanya kesempatan untuk menggunakan hak dengan kegiatan politik akan tetapi akhir-akhir ini kesadaran dari kaum intelektual mahasiswa mulai menurun.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang partisipasi politik ?
- IY : Partisipasi politik adalah salah satu kegiatan yang melibatkan diri dalam menentukan pilihan baik pemilihan maupun pemilihan presiden BEM.
- Peneliti : Menurut anda, apakah ada faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik ?
- IY : Faktor penghambat ialah kurang nya kesadaran dalam diri mahasiswa mengenai partisipasi politik.
- Peneliti : Menurut anda, apa faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik ?
- IY : 1) Faktor internal 2) faktor eksternal
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana proses pelaksanaan partisipasi politik mahasiswa?
- IY : Dilakukan secara langsung setiap mahasiswa diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan masing-masing.

- Peneliti : Menurut anda, apa tujuan pelaksanaan dari partisipasi politik mahasiswa ?
- IY : Agar mahasiswa memiliki kesadaran mengenai pentingnya partisipasi politik..
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam partisipasi politik ?
- IY : Keterlibatan mahasiswa dalam partisipasi politik akhir-akhir ini sangat menurun akan tetapi mengenai ketlibatan maka setiap mahasiswa diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan.
- Peneliti : Apa sajakah upaya yang anda lakukan agar terlibat kedalam partisipasi politik ?
- IY : Partisipasi Memperkuat narasi mengenai partisipasi politik, memperdalam pemahaman mengenai politik, memberikan hak suara.
- Peneliti : Menurut anda, Bagaimana kesadaran partisipasi politik Mahasiswa ?
- IY : Kesadaran partisipasi politik mahasiswa akhir-akhir ini sangat menurun, bahkan bisa dikatakan mahasiswa punya kesadaran mengenai partisipasi politik.
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana cara membangun kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?
- IY : Perbanyak membuat kegiatan yang berkaitan dengan politik, memberikan pemahaman pentingnya partisipasi politik dan membuat sosialisasi partisipasi politik.
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana tanggung jawab mahasiswa dalam partisipasi politik ?
- IY : Tanggung jawab mahasiswa yaitu mahasiswa harus menjaga sikap dan sudut pandang sendiri terhadap partisipasi politik
- Peneliti : Menurut anda, tanggung jawab seperti apa yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik ?
- IY : Mematuhi perintah menjaga, menjaga keamanan, mengadopsi sikap selama kegiatan partisipasi politik

- Peneliti : Menurut anda, apa saja bentuk partisipasi politik mahasiswa di kampus ?
- IY : Pemilihan ketua umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
- Peneliti : Mahasiswa harus menunjukkan sikap politiknya yang netral tetapi tetap mewarnai perkembangan politik yang memberikan suara kebenaran dan menjadi problem solver serta control sosio-politik yang ada. Menurut anda, bagaimana sikap mahasiswa dalam berpolitik ?
- IY : Memiliki kesadaran politik, memperbaiki diri dan melakukan perubahan, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengambil salah satu peran, melakukan control terhadap kebijakan.
- Peneliti : Menurut anda, apa contoh sikap partisipasi politik mahasiswa di lingkungan kampus ?
- IY : Melakukan aksi, membaca buku bersama-sama pun dikatakan sikap politik.

Filed Notes Wawancara

Nama : M.Dani Buamona

Semester : VII

Alamat : Akehuda

Hari/tanggal : Senin, 07 November 2022

Peneliti : Assalamu'alaikum. Wr.Wb

MD : Waalaikumsalam. Wr.Wb

Peneliti : Bagaimana pandangan anda tentang partisipasi politik mahasiswa ?

MD : Cukup baik, saya sering melihat mahasiswa melakukan peran dan mengikuti kegiatan partisipasi politik serta turut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik kampus

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang partisipasi politik ?

MD : Partisipasi politik adalah salah satu kegiatan yang melibatkan diri dalam menentukan kegiatan HMJ maupun pemilihan presiden BEM

Peneliti : Menurut anda, apakah ada faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik ?

MD : Adanya beda pendapat sehingga terhambatnya suatu komunitas

Peneliti : Menurut anda, apa faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik ?

- MD : Yaitu adanya persatuan, kerja sama, saling mendukung satu dan lainnya
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana proses pelaksanaan partisipasi politik mahasiswa?
- MD : Adanya kebersamaan dan kekompakan sehingga pelaksanaan itu berjalan dengan semestinya
- Peneliti : Menurut anda, apa tujuan pelaksanaan dari partisipasi politik mahasiswa ?
- MD : Partisipasi yang diambil dari mahasiswa yang tujuan yaitu dengan mahasiswa memiliki kesadaran agar mensukseskan suatu kegiatan tersebut.
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam partisipasi politik ?
- MD : Keterlibatan mahasiswa yaitu dengan ikut terampil dalam kegiatan dan mampu memberikan saran terkait dengan partisipasi politik
- Peneliti : Apa sajakah upaya yang anda lakukan agar terlibat dalam partisipasi politik ?
- MD : Upaya yang saya lakukan agar terlibat yaitu dengan menampilkan skill dan mampu memberikan pendapat
- Peneliti : Menurut anda, Bagaimana kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?
- MD : Dengan keinginan tahunan partisipasi politik maka kita akan sadar bahwa hal ini patut kita sadari namun ada mahasiswa yang tidak ada kesadaran mengenai partisipasi politik

- Peneliti : Menurut anda, bagaimana cara membangun kesadaran partisipasi politik mahasiswa ?
- MD : Dengan mengikuti kajian dan kegiatan politik
- Peneliti : Menurut anda, bagaimana tanggung jawab mahasiswa dalam partisipasi politik ?
- MD : Tanggung jawab mahasiswa yaitu mahasiswa harus menjaga sikap dan sudut pandang sendiri terhadap partisipasi politik
- Peneliti : Menurut anda, tanggung jawab seperti apa yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik ?
- MD : Mematuhi perintah menjaga, menjaga keamanan, mengadopsi sikap selama kegiatan partisipasi politik
- Peneliti : Menurut anda, apa saja bentuk partisipasi politik mahasiswa di kampus ?
- MD : Pemilihan ketua umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
- Peneliti : Mahasiswa harus menunjukkan sikap politiknya yang netral tetapi tetap mewarnai perkembangan politik yang memberikan suara kebenaran dan menjadi problem solver serta control sosio-politik yang ada. Menurut anda, bagaimana sikap mahasiswa dalam berpolitik ?
- MD : Memiliki kesadaran politik, memperbaiki diri dan melakukan perubahan, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengambil salah satu peran, melakukan control terhadap kebijakan.

RIWAYAT PENDIDIKAN



Salti Saiful lahir di Bajo Sangkuang, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 16 Maret 2000. Merupakan anak pertama dari pasangan Suami Istri Bapak Saiful Majid Sangaji dan Ibu Salbia Ahad. Penulis pertama kali mendapatkan Pendidikan Formal Sekolah Dasar di SD Negeri 9 Hal-Sel dan lulus

pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun yang sama di SMP Negeri 16 Hal-sel dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2015. Selanjutnya masuk pada sekolah menengah atas di SMA Negeri 21 Hal-sel dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Khairun Ternate Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Alhamdulillah lulus tahun 2023.